



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

TAHUN 2018 – 2022

**Jalan Firdaus H. Rais No. 38 SINGKAWANG 79123
Telepon : 0562-631425 Faks : (0562) 631425
Email : daginkopukm@singkawangkota.go.id**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-5
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	III-12
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-16
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-19
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (DISDAGINKOPUKM Kota Singkawang) senantiasa berupaya untuk dapat memberikan kontribusi bagi jalannya proses pembangunan daerah secara optimal. Untuk memenuhi maksud tersebut diperlukan suatu proses perencanaan jangka menengah yang terarah dan sistematis. Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan Perangkat Daerah (PD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka masing-masing Perangkat Daerah membuat sebuah rencana strategis sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta urusan pilihan Perdagangan dan Perindustrian maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang menyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2022 dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);



20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022, (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
21. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 54);
22. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Pasar Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 sebagai penjabaran RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun ke depan. Untuk itu perlu ditentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mendukung tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah :

1. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program-program prioritas di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah dalam kurun waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Mempermudah pengendalian, analisis dan evaluasi kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.



3. Sebagai sarana bagi instansi pemerintah untuk menjelaskan tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta perbaikan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada kinerja ;
4. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung pelaksanaan misi kepala daerah ;
5. Merumuskan kerangka dasar bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

1.4. Sistematika

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis



BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Struktur Organisasi

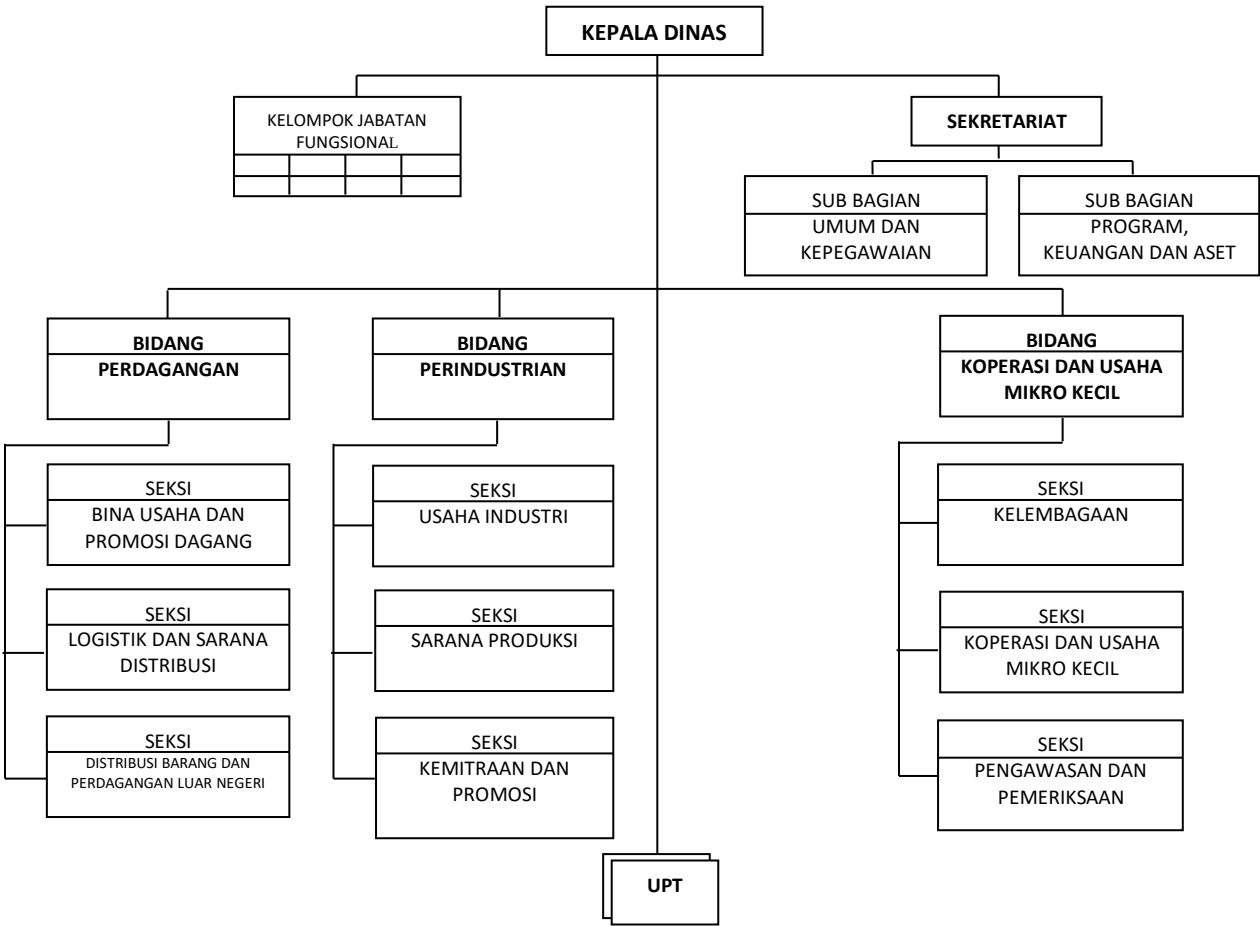
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan struktur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Program, Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Perdagangan terdiri atas :
 - 1) Seksi Bina Usaha dan Promosi Dagang;
 - 2) Seksi Logistik dan Sarana Distribusi; dan
 - 3) Seksi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri.
- d. Bidang Perindustrian terdiri atas :
 - 1) Seksi Usaha Industri;
 - 2) Seksi Sarana Produksi; dan
 - 3) Seksi Kemitraan dan Promosi.
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil terdiri atas :
 - 1) Seksi Kelembagaan;
 - 2) Seksi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal dan Pasar

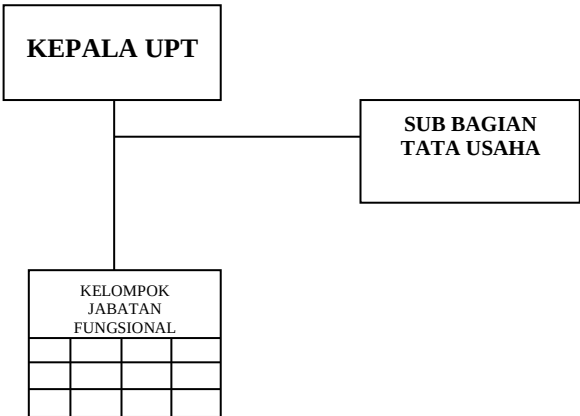
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH



Gambar 2.2
STRUKTUR ORGANISASI
UPT METROLOGI LEGAL DAN PASAR





2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 67 Tahun 2016, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Tugas :

- a. membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- b. memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

2) Sekretariat

Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;



- d. penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

2) Subbagian Program, Keuangan dan Aset

mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.

3) Bidang Perdagangan

Tugas :

menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan meliputi bina usaha dan promosi dagang, logistik dan sarana perdagangan, serta distribusi barang dan perdagangan luar negeri.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perdagangan;



- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis bina usaha dan promosi dagang;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis logistik dan sarana distribusi;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis distribusi barang dan perdagangan luar negeri;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada Bidang Perdagangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Seksi Bina Usaha dan Promosi Dagang mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Usaha dan Promosi Dagang;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bina usaha dan promosi dagang;
 - c. melaksanakan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - d. melaksanakan penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
 - e. melaksanakan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW);
 - f. melaksanakan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
 - g. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - h. memberikan rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antarpulau (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;



- i. melaksanakan penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
 - j. melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang lokal, pameran dagang nasional dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
 - k. melaksanakan kampanye pencitraan produk ekspor;
 - l. melaksanakan kebijakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
 - m. melaksanakan pengawasan terhadap penerbitan SIUP dan pendaftaran wajib daftar perusahaan; dan
 - n. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan PPNS Wajib Daftar Perusahaan (PPNS –WDP).
- 2) Seksi Logistik dan Sarana Distribusi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Logistik dan Sarana Distribusi;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pasar dan sarana perdagangan;
 - c. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan
 - d. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- 3) Seksi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis distribusi barang dan perdagangan luar negeri;
 - c. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d. melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;



- e. melaksanakan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kota;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap distributor dan pengecer pupuk pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- g. melaksanakan penyuluhan terhadap pelaku usaha distribusi barang dan jasa; dan
- h. melaksanakan kampanye pencitraan produk ekspor.

4) Bidang Perindustrian

Tugas :

menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian meliputi usaha industri, sarana produksi, dan kemitraan dan promosi.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perindustrian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis usaha industri;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis sarana produksi;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis kemitraan dan promosi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Perindustrian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Usaha Industri mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Usaha Industri;



- b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis usaha industri;
 - c. melaksanakan penetapan rencana pembangunan industri;
 - d. melaksanakan penyampaian laporan informasi industri untuk Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan izin perluasannya, Izin Usaha Industri (IUI) menengah dan izin perluasannya, dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
 - e. melaksanakan pembangunan wirausaha Industri melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pendaftaran merk, paten, desain industri dan hak cipta Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - g. melaksanakan upaya perlindungan kepastian berusaha;
 - h. melaksanakan penyediaan data dan informasi produk unggulan industri; dan
 - i. melaksanakan monitoring perusahaan industri yang berpotensi mencemari lingkungan.
- 2) Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana Produksi;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis sarana produksi;
 - c. melaksanakan penelitian, pengembangan, penerapan dan pemanfaatan hasil penelitian pengembangan teknologi industri;
 - d. melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - e. melaksanakan pembinaan asosiasi industri serta pembangunan sarana dan prasarana Industri.
- 3) Seksi Kemitraan dan Promosi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kemitraan dan Promosi;



- b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kemitraan dan promosi;
- c. melaksanakan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar serta sektor ekonomi lainnya;
- d. melaksanakan pendataan industri prioritas sebagai produk unggulan daerah; dan
- e. melaksanakan fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri Kreatif di dalam dan luar negeri.

5) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Tugas :

menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil meliputi kelembagaan, koperasi dan usaha mikro kecil dan pengawasan dan pemeriksaan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
- b. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan kelembagaan;
- c. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil;
- d. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



- 1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kelembagaan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kelembagaan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT);
 - d. melaksanakan penyuluhan perkoperasian;
 - e. melaksanakan penerbitan izin usaha simpan pinjam;
 - f. melaksanakan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas koperasi simpan pinjam, pengajuan Nomor Induk Koperasi;
 - g. melaksanakan penilaian koperasi berprestasi; dan
 - h. melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian.
- 2) Seksi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis koperasi dan usaha mikro kecil;
 - c. melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha mikro kecil melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, pembinaan di sektor produksi, pemasaran dan pembiayaan.
- 3) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan; dan
 - c. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dan penilaian kesehatan koperasi, penanganan dan penyelesaian kasus perkoperasian.



f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal dan Pasar

Ditetapkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Pasar.

Tugas :

memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Operasional UPT Metrologi Legal dan Pasar berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPT Metrologi Legal dan Pasar ;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP yang dimiliki pedagang;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penagihan retribusi kepada pedagang formal dan informal serta penyetoran ke Kas Daerah;
- d. pelaksanaan penataan, pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang informal, termasuk UTTP yang belum ditera atau tera ulang ;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPT (administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga UPT serta urusan umum lainnya) ;
- f. pembinaan terhadap staf di lingkungan UPT ; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Tata Usaha

melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga UPT serta urusan umum.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil di kantor Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebanyak 43 orang, dengan komposisi pegawai ditunjukkan pada Tabel berikut :

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kepala Dinas	1	-	1
Sekretariat	5	5	10
Bidang Perdagangan	4	2	6
Bidang Perindustrian	4	2	6
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4	3	7
UPT Metrologi Legal dan Pasar	12	1	13
Total	30	13	43

2. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Pangkat	Gol/ Ruang	Kepala Dinas	Unit Kerja Dinas					Jumlah
			Sekretariat	Bidang Perindustrian	Bidang Perdagangan	Bidang Koperasi dan Ukm	UPT	
Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	-	-	1
Pembina Tk. I	IV/b	-	1	-	-	-	-	1
Pembina	IV/a	-	-	-	1	1	-	2
Penata Tk.I	III/d	-	-	3	2	3	-	8
Penata	III/c	-	3	1	-	-	4	8
Penata Muda Tk. I	III/b	-	2	1	1	1	3	8
Penata Muda	III/a	-	1	-	1	1	2	5
Pengatur Tk.I	II/d	-	1	1	-	1	-	3
Pengatur	II/c	-	2	-	1	-	3	6
Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-
Juru Tk.I	I/d	-	-	-	-	-	1	1
Total		1	10	6	6	7	13	43



3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Kepala Dinas	Unit Kerja Dinas					Jumlah
		Sekretariat	Bidang Perindustrian	Bidang Perdagangan	Bidang Koperasi dan Ukm	UPT	
S 2	1	-	1	1	-	-	3
S 1	-	3	3	4	4	4	18
D 3	-	1	1	1	1	1	5
SLTA Sederajat	-	5	1	1	2	4	14
SLTP Sederajat	-	1	-	1	-	1	3
SD Sederajat	-	-	-	-	-	1	1
Total	1	10	6	8	7	11	43

4. Data Aset

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang menempati sebuah gedung yang beralamat di Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang, Nomor Telepon : 0562-631425 dan Nomor Faksimili : (0562) 631425.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Data Aset Tahun 2017

No	Uraian	31 Des 2017 (Rp)
	ASET LANCAR	44.970.550,00
A.	Persediaan	44.970.550,00
	- Persediaan Bahan Pakai Habis	44.970.550,00
	ASET TETAP	40.556.855.734,44
A.	Tanah	16.331.756.867,22
	- Tanah Untuk Bangunan Gedung	16.331.756.867,22
B.	Peralatan dan Mesin	5.552.285.938,00
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	1.786.561.992,00
	- Alat Ukur	639.608.449,00
	- Alat Kantor	198.315.065,00
	- Alat Rumah Tangga	484.485.732,00
	- Komputer	476.655.300,00
	- Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	125.577.900,00
	- Alat Studio	56.025.000,00



No	Uraian	31 Des 2017 (Rp)
	- Alat Komunikasi	9.245.000,00
	- Unit-unit Laboratorium	1.772.864.800,00
	- Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.946.700,00
C	Gedung dan Bangunan	23.146.897.540,59
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	22.758.553.540,59
	- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	388.344.000,00
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.976.763.779,06
	- Jalan	643.347.810,82
	- Bangunan Air Irigasi	1.666.504.693,24
	- Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0
	- Bangunan Air Bersih/Air Baku	20.000.000,00
	- Bangunan Air Kotor	1.080.819.645,00
	- Instalasi Pembangkit Listrik	426.679.030,00
	- Instalasi Gardu Listrik	60.697.000,00
	- Jaringan Air Minum	12.383.100,00
	- Jaringan Listrik	66.332.500,00
E	Aset Tetap Lainnya	21.940.000,00
	- Buku	21.940.000,00
F	Konstruksi dalam Pengerjaan	237.106.000,00
	- Konstruksi dalam Pengerjaan	237.106.000,00
G	Akumulasi Penyusutan	(8.709.894.390,43)
	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.070.419.700,80)
	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.337.922.254,40)
	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(301.552.435,23)
	JUMLAH TOTAL ASET	40.601.826.284,44

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang menyelenggarakan dua jenis urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai urusan wajib dan urusan Perdagangan dan Perindustrian sebagai urusan pilihan.

Pada urusan koperasi dan UKM sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang dikelola secara mandiri dan profesional dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan kondisi dan lingkungan usaha yang sehat serta kondusif bagi perkembangan investasi dan membuka peluang peningkatan peranan masyarakat melalui pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan usaha mikro kecil Kota Singkawang, peningkatan ketrampilan sumber daya manusia serta memperkuat kelembagaan usaha mikro kecil.



Tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah khususnya urusan koperasi dan usaha kecil menengah secara umum di Kota Singkawang pada Tahun 2017 sebagai tahun awal perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah kelembagaan koperasi yang ada di Kota Singkawang pada Tahun 2017 sebanyak 164 unit, sedangkan jumlah usaha kecil menengah (UKM) di Kota Singkawang pada Tahun 2017 sebanyak 5.177 unit. Menurut data UKM berdasarkan sektor ekonomi Kota Singkawang Tahun 2017, UKM terdiri dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang meliputi bidang usaha kuliner, fashion, agrobisnis, otomotif, teknologi internet dan bidang usaha lainnya.

Kelembagaan koperasi dan UKM selama kurun waktu lima tahun dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 cukup mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017 jumlah koperasi sebanyak 164 unit, meningkat 5,13% dari Tahun 2013 yang berjumlah 156 unit. Pada Tahun 2017 jumlah koperasi aktif sebanyak 58 unit, menurun 12,12% dari Tahun 2013 yang berjumlah 66 unit. Meskipun secara keseluruhan pertumbuhan jumlah koperasi meningkat namun jumlah koperasi aktif mengalami penurunan karena masih kurangnya kesadaran koperasi dalam melakukan RAT secara rutin setiap tahun.

Sedangkan jumlah UKM pada Tahun 2017 sebanyak 5.177 unit mengalami peningkatan sebesar 29,55% dari Tahun 2013 yang berjumlah 3.996 unit.

Perkembangan jumlah koperasi dan UKM di Kota Singkawang dari Tahun 2013 - 2017 lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Perkembangan Jumlah Koperasi dan UKM di Kota Singkawang
Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Koperasi	156	158	160	164	164
2	Jumlah Koperasi Aktif	66	68	70	58	58
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	90	90	90	106	106
4	% Koperasi Aktif	42,31	43,04	43,75	35,37	35,37
5	Jumlah UKM	3.996	4.396	4.560	4.837	5.177



Untuk data perkembangan koperasi berdasarkan jumlah anggota dan volume usaha Tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Perkembangan Koperasi di Kota Singkawang
Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Koperasi	156	158	160	164	164
2	Jumlah Anggota (orang)	28.041	30.091	32.156	33.172	34.139
3	Jumlah Manager (orang)	21	22	27	29	30
4	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	228	230	229	243	274
5	Jumlah Modal Sendiri (Rp.)	41.076.371.000	61.596.349.000	76.847.019.000	80.986.688.000	90.814.343.000
6	Jumlah Modal Luar (Rp.)	34.205.153.000	17.805.424.000	30.459.401.000	23.513.205.000	29.062.782.000
7	Volume Usaha (Rp.)	181.222.369.000	202.718.135.000	202.718.135.000	345.953.657.000	301.315.493.000
8	Sisa Hasil Usaha (Rp.)	8.738.299.000	10.710.833.000	5.521.251.000	4.716.747.000	4.415.007.000
9	Asset (Rp.)	236.387.149.000	277.450.865.000	301.327.559.000	321.910.876.000	378.028.907.000

Pada urusan perdagangan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya perlindungan konsumen dan tertib ukur alat UTP, meningkatnya kualitas sumber daya pelaku usaha, jaringan distribusi produk/barang dan akses pasar, meningkatnya infrastruktur pasar dan penataan PKL, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan kondisi dan lingkungan usaha yang sehat, tertata serta kondusif bagi perkembangan investasi dan membuka peluang peningkatan peranan masyarakat untuk mengembangkan citra positif Kota Singkawang sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa, menjamin kepastian usaha, meningkatkan perolehan PAD dari retribusi daerah (retribusi pasar).

Tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah khususnya urusan perdagangan secara umum di Kota Singkawang pada Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

Di sektor perdagangan, jumlah unit perdagangan di Kota Singkawang Tahun 2017 mencapai 5.973 unit usaha yang terdiri dari Perdagangan Kecil sebanyak 5.098 unit; Perdagangan Menengah sebanyak 833 unit dan Perdagangan Besar sebanyak 42 unit. Jumlah unit perdagangan tahun 2017 ini secara umum mengalami peningkatan sebanyak 944 unit atau 18,77% bila dibandingkan dengan jumlah unit perdagangan Tahun 2013 sebanyak 5.029 unit. Berikut ini perkembangan jumlah perdagangan di Kota Singkawang dari Tahun 2013-2017 dalam tabel.



Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Perdagangan di Kota Singkawang
Tahun 2013 - 2017

No	Jenis Perdagangan (Unit)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Perdagangan Kecil	4.233	4.396	4.759	4.912	5.098
2	Perdagangan Menengah	758	764	793	809	833
3	Perdagangan Besar	38	39	41	42	42
	Jumlah	5.029	5.199	5.593	5.763	5.973

Dari sektor perolehan pendapatan (PAD) khususnya yang berasal dari Hasil Retribusi Daerah (Retribusi Pasar) dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan cukup signifikan, berikut ini target dan realisasi PAD dari Retribusi Pasar dari Tahun 2013-2017 dalam tabel :

Tabel 2.8
Perkembangan Jumlah PAD dari Retribusi Pasar di Kota Singkawang
Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Target PAD (Rp)	310.860.000	310.860.000	310.860.000	325.500.000	400.000.000
Realisasi PAD (Rp)	164.020.000	155.910.000	333.410.000	344.920.000	308.120.000
% Realisasi	52,76	50,15	107,25	105,97	77,03

Pada urusan perindustrian sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya nilai-nilai produktifitas pada proses pengelolaan usaha industri kecil menengah serta meningkatnya kapasitas dan daya saing industri kecil menengah.

Tingkat pencapaian kinerja SKPD khususnya urusan perindustrian secara umum di Kota Singkawang Tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Secara umum jumlah perusahaan industri kecil menengah formal yang ada di Kota Singkawang dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 menunjukkan peningkatan. Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah (IKM) pada Tahun 2013 sebesar 380 perusahaan meningkat menjadi 423 perusahaan atau meningkat sebesar 11,32% pada Tahun 2017.



- b. Selama Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 perusahaan industri kecil menengah formal yang ada di Kota Singkawang ini berhasil menyerap ribuan tenaga kerja. Serapan tenaga kerja Tahun 2017 mengalami peningkatan sejak Tahun 2013. Tahun 2013 terserap tenaga kerja sebesar 1.654 orang dan pada Tahun 2017 tenaga kerja yang terserap menjadi 2.041 orang atau terjadi peningkatan sebesar 23,40 %.

Berikut ini perkembangan jumlah IKM di Kota Singkawang dari Tahun 2013-2017 dalam tabel :

Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah IKM di Kota Singkawang
Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah IKM	380	406	412	420	423
2	Persentase pertumbuhan jumlah IKM	6,74	6,84	1,48	1,94	0,71
3	Jumlah Tenaga Kerja	1.654	1.895	1.958	1.982	2.041
4	Nilai Investasi (Rp)	36.131.685.000	75.857.999.000	76.744.749.000	78.714.749.000	78.764.749.000
5	Nilai Produksi (Rp)	37.750.024.000	134.534.024.000	136.037.524.000	137.551.024.000	137.551.024.000

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2013-2017 untuk masing-masing bidang urusan pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut ini :

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang
Tahun 2013 s/d 2017

No	Indikator Kinerja sesuai Bidang Urusan Pemerintahan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	6	7	8	9	10
A.	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
1.	Jumlah Koperasi	156	158	160	164	164
2.	Jumlah Koperasi Aktif	66	68	70	58	58
3.	Persentase Koperasi Aktif	42,31	43,04	43,75	35,37	35,37
4.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	3.931	4.331	4.495	4.770	5.043
5.	Jumlah UKM	3.996	4.396	4.560	4.837	5.177
6.	Persentase Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dibanding Jumlah UKM	98,37	98,52	98,57	98,61	97,41
7.	Persentase UKM Aktif	97,90	98,09	98,16	98,26	98,38



No	Indikator Kinerja sesuai Bidang Urusan Pemerintahan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	6	7	8	9	10
B.	Bidang Perdagangan					
1.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemerintah	6	6	6	6	6
2.	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	9	9	13	13	13
3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	66,67	66,67	46,15	46,15	46,15
C.	Bidang Perindustrian					
1.	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bant an binaan pemerintah	1	1	2	2	2
2.	Jumlah kelompok pengrajin	3	4	5	5	6
3.	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	33,33	25,00	40,00	40,00	33,33



Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang
Tahun 2013 s/d 2017

Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	337.400.000	265.000.000	-	45.539.400	-	337.400.000	265.000.000	-	45.539.400	-	91,16	99,80	0	100	0
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	-	-	-	45.539.400	-	-	-	-	45.539.400	-	0	0	0	100	0
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	337.400.000	265.000.000	-	-	-	307.558.000	264.481.800	-	-	-	91,16	99,80	0	0	0
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	-	100.787.200	32.698.500	72.170.900	140.638.450	-	100.587.200	32.698.500	62.620.900	140.394.600	0	99,80	100	86,77	99,83
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	19.040.200	32.698.500	33.169.000	140.638.450	-	19.040.200	32.698.500	33.169.000	140.394.600	0	100	100	100	99,83
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	-	23.786.000	-	-	-	-	23.786.000	-	-	-	0	100	0	0	0
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	-	57.961.000	-	39.001.900	-	-	57.761.000	-	29.451.900	-	0	99,65	0	75,51	0



Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	61.417.000	110.991.400	118.852.600	73.024.600	-	60.712.700	110.991.400	111.802.600	72.744.600	0	98,85	100	94,07	99,62
Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah	-	-	59.362.500	-	-	-	-	59.362.500	-	-	0	0	100	0	0
Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	-	61.417.000	51.628.900	118.852.600	73.024.600	-	60.712.700	51.628.900	111.802.600	72.744.600	0	98,85	100	94,07	99,62
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	30.255.000	74.806.200	1582.13.100	49.915.300	-	30.255.000	73.206.200	155.570.900	49.915.300	-	100	97,86	98,33	100	0
Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	-	31.652.000	-	-	-	-	31.452.000	-	-	-	0	99,37	0	0	0
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	30.255.000	43.154.200	49.915.300	49.915.300	-	30.255.000	41.754.200	49.748.100	49.915.300	-	100	96,76	99,67	100	0
Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis usaha koperasi	-	-	56.879.500	-	-	-	-	55.754.500	-	-	0	0	98,02	0	0
Bimtek prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	-	-	51.418.300	-	-	-	-	50.068.300	-	-	0	0	97,37	0	0
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	4.371.834.000	1.017.899.000	32.0778.000	389.380.400	151.238.500	4.263.521.500	673.292.000	250.225.000	236.780.400	123.091.000	97,52	66,15	78,01	60,81	81,39



Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	19.404.000	19.324.500	-	77.136.400	-	-	2.884.500	-	42.794.400	-	0	14,93	0	55,48	0
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah	4.352.430.000	99.8574.500	320.778.000	312.244.000	49.650.000	4.263.521.500	670.407.500	250.225.000	193.986.000	21.705.000	97,96	67,14	78,01	62,13	43,72
Tertib Ukur Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya)	-	-	-	-	101.588.500	-	-	-	-	101.386.000	0	0	0	0	99,80
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	-	-	22.554.500	90.832.600	66.650.500	-	-	-	49.977.600	48.770.500	0	0	0	55,02	73,17
Pembangunan promosi perdagangan internasional	-	-	-	90.832.600	66.650.500	-	-	-	49.977.600	48.770.500	0	0	0	55,02	73,17
Pengujian Produk SNI	-	-	22.554.500	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	158.450.000	426.674.500	479.373.700	512.268.200	433.813.400	158.450.000	375.234.500	457.469.500	504.288.200	432.249.600	100	87,94	95,43	98,44	99,64
Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	-	-	49.435.000	-	-	-	-	43.890.000	-	-	0	0	88,78	0	0
Penatalaksanaan Perijinan Pengembangan Usaha	-	-	15.000.500	28.423.000	-	-	-	9.455.500	21.623.000	-	0	0	63,03	76,08	0
Pasar Murah	158.450.000	426.674.500	414.938.200	483.845.200	433.813.400	158.450.000	375.234.500	404.124.000	482.665.200	432.249.600	100	87,94	97,39	99,76	99,64



Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	2.539.382.000	1.483.200.000	-	2.632.311.300	139.987.700	2.375.270.000	496.091.500	-	1.990.468.000	94.335.750	93,54	33,45	0	75,62	67,39
Kegiatan Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	-	-	-	65.553.800	139.987.700	-	-	-	5.930.000	94.335.750	0	0	0	9,05	67,39
Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan	65.824.000	63.000.000	-	-	-	24.181.500	57.730.000	-	-	-	36,74	91,63	0	0	0
Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	2.020.858.000	1.307.750.000	-	2.566.757.500	-	1.967.376.500	326.224.000	-	1.984.538.000	-	97,35	24,95	0	77,32	0
Kegiatan Fasilitasi Tempat Usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	452.700.000	112.450.000	-	-	-	38.3712.000	112.137.500	-	-	-	84,76	99,72	0	0	0
Program Revitalisasi Pasar Tradisional	-	-	5.550.000.000	5.500.000.000	8.340.487.700	-	-	3.881.060.000	2.202.773.500	8.340.418.000	0	0	69,93	40,05	99,999
Pengadaan Tanah Rencana Lokasi Pasar	-	-	5.550.000.000	5.500.000.000	8.340.487.700	-	-	3.881.060.000	2.202.773.500	8.340.418.000	0	0	69,93	40,05	99,999
Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	-	-	3.569.433.000	5.122.122.500	4.824.011.000	-	-	3.362.402.300	4.942.738.800	3.301.867.650	0	0	94,20	96,50	68,45
Penataan Pasar	-	-	2.736.227.500	2.858.392.500	1.757.255.500	-	-	2.533.666.600	2.692.763.000	315.678.000	0	0	92,60	94,21	17,96
Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL	-	-	833.205.500	2.263.730.000	3.066.755.500	-	-	828.735.700	2.249.975.800	2.986.189.650	0	0	99,46	99,39	97,37
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	-	-	93.992.800	-	71.436.000	-	-	93.772.800	-	64.162.500	0	0	99,77	0	89,82



Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pendampingan Pelatihan Pengolahan Pangan	-	-	93.992.800	-	71.436.000	-	-	93.772.800	-	64.162.500	0	0	99,77	0	89,82
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	647.986.000	580.730.000	552.741.900	980.066.700	1.000.627.500	643.228.000	579.878.700	540.817.900	963.772.200	838.476.240	99,27	99,85	97,84	98,34	83,80
Penyusunan kebijakan Industri Kecil dan Menengah	-	-	-	-	254.329.000	-	-	-	-	198.880.000	0	0	0	0	78,20
Singkawang Expo	340.000.000	364.400.000	390.942.000	551.242.000	441.612.000	335.592.000	364.000.000	390.342.000	537.542.000	425.102.940	98,70	99,89	99,85	97,51	96,26
Fasilitasi Pendaftaran Hak Paten (Merk Dagang)	20.000.000	29.920.000	34.108.700	-	-	20.000.000	29.468.700	32.984.700	-	-	100	98,49	96,70	0	0
Pemberian Bantuan Mesin Dan Peralatan IKM	250.000.000	-	66.104.000	201.397.000	86.535.000	249.650.000	-	65.904.000	200.941.500	-	99,86	0	99,70	99,77	0
Sosialisasi Penerapan P-IRT	-	7.690.000	12.795.200	-	-	-	7.690.000	12.795.200	-	-	0	100	100	0	0
Promosi Produk IKM	-	65.000.000	48.792.000	107.662.000	136.558.000	-	65.000.000	38.792.000	106.153.000	133.035.500	0	100	79,50	98,60	97,42
Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE (Creation Of Enterprises Of Entrepreneurs)	-	113.720.000	-	119.765.700	81.593.500	-	113.720.000	-	119.135.700	81.457.800	0	100	0	99,47	99,83
Fasilitasi Pendampingan Pelatihan Desain Kemasan	37.986.000	-	-	-	-	37.986.000	-	-	-	-	100	0	0	0	0
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	23.630.000	62.930.000	-	59.888.000	-	23.630.000	60.838.800	-	55.888.000	-	100	89,29	0	93,32	0



Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perluasan Penerapan SNI untuk Mendorong Daya Saing Industri Manufaktur	9.740.000	-	-	-	-	9.740.000	-	-	-	-	100	0	0	0	0
Fasilitasi Pendampingan Penerapan P-IRT	13.890.000	-	-	-	-	13.890.000	-	-	-	-	100	0	0	0	0
Fasilitasi Pendampingan Pelatihan Aneka Keramik	-	62.930.000	-	-	-	-	60.838.800	-	-	-	0	96,68	0	0	0
Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan	-	-	-	59.888.000	-	-	-	-	55.888.000	-	0	0	0	93,32	0
Total	8.108.937.000	4.073.443.900	10.732.563.800	15.573.347.900	15.241.915.350	7.831.754.500	2.684.841.600	8.885.008.300	11.216.564.900	13.456.510.440	96,58	65,91	82,79	72,02	88,29



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan :

1. Rendahnya produktivitas dan daya saing produk IKM/UMKM ;
2. Kurangnya kualitas sumber daya manusia IKM/UMKM terutama pada keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen ;
3. Terbatasnya akses IKM/UMKM kepada sumber daya produktif seperti bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar ;
4. Kurang optimalnya penataan infrastruktur perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Peluang :

1. Cukup tersedianya sumber daya produktif sektor ekonomi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia ;
2. Tumbuhnya usaha skala mikro kecil setiap tahun di Kota Singkawang yang berpotensi untuk dibina dan dikembangkan;
3. Dukungan orientasi kebijakan industri ke arah industri yang berbasis sumber daya alam terutama industri kerajinan dan industri pengolahan makanan memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya IKM/UMKM ;
4. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang cukup luas bagi pemerintah daerah dalam hal pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota yang mendukung pengembangan Industri, Perdagangan dan Pasar Tradisional.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM mengalami permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Terbatasnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia Pembina Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam menangani permasalahan manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
2. Belum tersedianya Tenaga Fungsional Penyuluh Industri;
3. Minimnya kegiatan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kemampuan teknis aparatur;
4. Kurangnya pengetahuan SDM aparatur khususnya pada penguasaan teknologi industri kecil menengah;
5. Belum maksimalnya SDM aparatur dalam pembinaan dan penataan pedagang;
6. Belum optimalnya penataan infrastruktur perdagangan khususnya pasar tradisional;
7. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur perdagangan yang telah dibangun/revitalisasi;
8. Rendahnya SDM pengurus koperasi dalam hal manajemen keuangan, produksi dan pemasaran sehingga koperasi tidak bisa berkembang secara maksimal;
9. Terbatasnya akses jaringan pemasaran atau promosi produk IKM/KUMKM yang disediakan oleh pemerintah
10. Kurangnya penguasaan teknologi pada industri kecil menengah dan relatif memerlukan biaya besar untuk dikelola secara mandiri;
11. Lemahnya jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) masyarakat.

Berikut ini identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang dalam tabel.



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANGAN PD)	(DILUAR KEWENANGAN PD)	
1	2	3	4	5	6
1. Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah Kota Singkawang	Belum semua IKM dibina secara berkelanjutan	Tugas dan fungsi Bidang Perindustrian	Kebijakan Dinas yang dituang dalam RKA kegiatan Bidang	Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang sulit diaplikasikan di lapangan	1. Program Perkuatan Anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan program / kegiatan 2. Kurangnya jumlah tenaga aparatur 3. Kurangnya pengetahuan SDM Aparatur khususnya pada penguasaan teknologi dan manajemen 4. Masih lemahnya koordinasi lintas instansi pembina terkait 5. Masih kurangnya partisipasi pelaku usaha dalam mendukung kegiatan
2. Pengembangan pasar dan distribusi serta pembinaan kepada pelaku usaha di Kota Singkawang	Pengembangan pasar masih dalam tahap lanjutan yang belum optimal dalam segi pemanfaatan dan belum semua pelaku usaha dan kelompok/organisasi pedagang telah dibina secara berkelanjutan	Tugas dan fungsi Bidang Pedagangan	Kebijakan Dinas yang dituang dalam RKA kegiatan Bidang	Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang sulit diaplikasikan di lapangan	1. Program Perkuatan Anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan program / kegiatan 2. Kurangnya jumlah tenaga aparatur 3. Kurangnya tingkat profesionalisme SDM Aparatur khususnya pada penguasaan regulasi dan kebijakan perdagangan dalam negeri



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANGAN PD)	(DILUAR KEWENANGAN PD)	
1	2	3	4	5	6
					4. Masih lemahnya koordinasi lintas instansi pembina terkait 5. Masih kurangnya partisipasi dan kesadaran kelompok /organisasi pedagang dalam mendukung program pemerintah
3. Pembinaan Kepada Koperasi Kota Singkawang	Masih rendahnya kemampuan kelembagaan dan organisasi manajemen koperasi	Tugas dan fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Kebijakan Dinas yang dituang dalam RKA kegiatan Bidang	Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang sulit diaplikasikan di lapangan	1. Kurangnya jumlah tenaga aparatur untuk melakukan pembinaan di lapangan terhadap koperasi di Kota Singkawang 2. Masih kurangnya koperasi yang aktif melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan rutin kepada dinas 3. Terbatasnya pengetahuan dan wawasan pengurus dan pengelola dalam upaya memahami Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
4. Masih rendahnya SDM pengurus dan pengelola koperasi dalam manajemen dan pengelolaan usaha	Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan dan latihan tentang manajemen usaha dan kewirausahaan terhadap pengurus dan pengelola koperasi	Tugas dan fungsi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Kebijakan Dinas yang dituang dalam RKA kegiatan Bidang	Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah yang sulit diaplikasikan di lapangan	1. Anggaran kerja yang tersedia belum dapat memenuhi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan pengelola koperasi 2. Belum standarnya sistem pelaporan keuangan pengurus dan pengelola koperasi dalam menyusun laporan keuangan yang di sajikan setiap tahun



Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			INTERNAL	EKSTERNAL	
			(KEWENANGAN PD)	(DILUAR KEWENANGAN PD)	
1	2	3	4	5	6
					3. Terbatasnya tenaga-tenaga profesional dalam mengelola dan mengembangkan usaha dengan sistem manajemen 4. Kurang efektifnya sistem pembelajaran pendidikan dan pelatihan yang tepat bagi pengurus dan pengelola terutama penguasaan manajemen usaha dan kewirausahaan



3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan Visi Pemerintah Kota Singkawang yaitu **“Singkawang HEBAT 2022”** mengandung makna strategis bahwa Kota Singkawang pada lima tahun mendatang akan diwujudkan dengan kondisi atau capaian sebagai berikut :

Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya;

Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;

Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemeritahan;

Adil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan Dan Pendidikan;

Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Sedangkan misi Pemerintah Kota Singkawang yang tercantum dalam RPJMD 2018-2022 khususnya terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi kedua: **“Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri”**; dan misi ketujuh **“Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata”**; yang memiliki sasaran Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif serta Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan pariwisata.

Untuk mendukung suksesnya pencapaian misi Pemerintah Kota Singkawang tersebut maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupaya mengimplementasikan kedalam program kegiatan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2022 Kota Singkawang, antara lain Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, Program Revitalisasi Pasar Tradisional, Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan, Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dan Program Penataan Struktur Industri.

Berikut ini adalah faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Daerah dalam tabel.



Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Daerah

Visi : Singkawang HEBAT 2022				
Misi Kedua : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri				
No	Program dan Kegiatan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
	1. Kegiatan Sosialisasi Penerapan P-IRT	1. Keterbatasan anggaran sehingga pelaku usaha yang difasilitasi terbatas	1. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha makanan dalam membuat P-IRT	1. Kota Singkawang dikenal sebagai salah satu pusat pariwisata dan sentra kuliner Kalbar
		2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Kesehatan)	2. Masih banyak IKM makanan yang belum terdata dikarenakan berproduksi belum secara kontinyu	2. Sebagian besar IKM Kota Singkawang adalah IKM pengolahan makanan
	2. Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE (Creation Of Enterprises Formation Of Entrepreneurs)	1. Keterbatasan anggaran kegiatan	1. Masih kurangnya keinginan masyarakat untuk menjadi wirausahawan	1. Lembaga swasta/perbankan yang terkait mendukung kegiatan
		2. Instruktur masih dari pihak ketiga karena belum ada aparatur yang kompeten		



No	Program dan Kegiatan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	3. Kegiatan Fasilitas Pendampingan Pelatihan Desain Kemasan	1. Keterbatasan anggaran sehingga peserta pelatihan terbatas	1. Pelaku usaha masih menganggap mahal biaya kemasan sehingga mereka menggunakan kemasan yang belum sesuai dengan kaedah kemasan yang benar	1. Ada beberapa produk unggulan yang sudah memperhatikan kaedah kemasan tapi desain masih sederhana
		2. Instruktur masih dari pihak ketiga karena belum ada aparatur yang kompeten	2. Pelaku usaha belum mampu untuk mendesain kemasan sendiri	
	4 Singkawang Expo	1. Keterbatasan anggaran sehingga pelaku usaha yang difasilitasi terbatas	1. Masih ada pelaku usaha yang tidak memanfaatkan secara maksimal fasilitas yang disediakan	1. Menjadi agenda tahunan Pemerintah Daerah dalam memperingati HUT Kota Singkawang
		2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi dan pihak terkait		
2.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri			
	1. Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan	1. Keterbatasan anggaran	1. Proses produksi masih dilakukan secara sederhana	1. Ketersediaan bahan baku yang cukup di Kota Singkawang
		2. Instruktur masih dari pihak ketiga karena belum ada aparatur yang kompeten	2. Kurangnya SDM / tenaga terampil dan terdidik	
			3. Kreatifitas dalam pengembangan desain dan ragam produk masih kurang	



No	Program dan Kegiatan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
3.	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif			
	1. Fasilitasi Sarana Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil	1. Keterbatasan anggaran sehingga pelaku usaha yang difasilitasi terbatas	1. Minimnya sarana dan prasarana usaha yang dimiliki koperasi dan UMKM	1. Adanya potensi jumlah koperasi dan UMKM yang memerlukan pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana usaha
4.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
	1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan (Manajemen Usaha)	1. Belum standarnya sistem pelaporan keuangan pengurus dan pengelola koperasi dalam menyusun laporan keuangan yang di sajikan setiap tahun	1.1 Kurangnya pengetahuan dan penguasaan pengurus dan pengelola tentang standar akuntansi keuangan (SAK-ETAP)	1.1 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung IT dengan sistem komputerisasi yang dimiliki oleh koperasi
			1.2 Kurangnya koordinasi dan inisiatif pengurus dan pengelola koperasi untuk melakukan konsultasi dengan pembina koperasi	
			1.3 Kurangnya tenaga aparatur pembina koperasi untuk melakukan pembinaan di lapangan	
		2. Terbatasnya tenaga-tenaga profesional dalam mengelola dan mengembangkan usaha dengan sistem managerisasi dalam pengelolaan yang ditangani dalam sistem manajemen	2.1 Kurangnya regenerasi/kaderisasi pengurus dan pengelola koperasi	2.1 Adanya potensi anggota yang memiliki SDM dan kemampuan tetapi belum mendapatkan kesempatan untuk mengurus dan mengelola koperasi



No	Program dan Kegiatan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			2.2 Terbatasnya SDM pengurus dan pengelola yang memiliki pengetahuan dan wawasan dalam tingkat pendidikan yang diperlukan	2.2 Tersedianya SDM yang memiliki standar dan wawasan serta pendidikan lulusan sarjana yang belum dimanfaatkan
		3 Kurang efektifnya sistem pembelajaran pendidikan dan pelatihan yang tepat bagi pengurus dan pengelola terutama penguasaan manajemen usaha dan kewirausahaan	3.1 Pola dan sistem pembelajaran kurang menarik dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang berhubungan langsung dengan waktu pembelajaran, materi, pengajar/narasumber, dan peserta(pengurus dan pengelola)	3.1 Adanya keinginan dan kebutuhan pengurus dan pengelola yang tepat dan mau untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan wawasan manajemen dan kewirausahaan (seperti alumni pelatihan CEFE)
	2. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD (Pelatihan Manajemen Pengelolaan Perkoperasian yang berhubungan langsung dengan UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian)	1 Terbatasnya pengetahuan dan wawasan pengurus dan pengelola dalam upaya memahami Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	1 Belum berubahnya pola pikir/paradigma pengurus dan pengelola terhadap pemahaman Undang-Undang No.25 Tahun 1992	1 Pelaksanaan sosialisasi yang terstruktur harus dilakukan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota baik dalam bentuk publikasi melalui media (TV, internet, surat kabar, tabloid, leaflet) maupun pertemuan-pertemuan lintas sektoral yang mendukung pemahaman Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian



No	Program dan Kegiatan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
5.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
	1. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi	1. Terbatasnya tenaga aparatur pembina koperasi untuk melakukan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi	1. Adanya mutasi dan promosi aparatur pembina koperasi tanpa adanya tambahan tenaga pegawai baru yang menggantikan	1. Adanya kemauan dan tanggungjawab aparatur pembina koperasi untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi Berprestasi sesuai tupoksi, sarana/prasarana dan SDM yang dimiliki.
Misi Ketujuh : Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata				
1.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			
	1. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	1. Keterbatasan anggaran kegiatan	1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya metrologi legal	1. Ketersediaan sarana prasarana kemetrolagian
		2. Masih kurangnya peningkatan SDM Aparatur (tenaga penera) dalam mengupgrade ilmu dan kemampuan		2. Kota Singkawang ditetapkan sebagai daerah Tertib Ukur pertama dan satu-satunya di Indonesia
2.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
	1. Pasar Murah	1. Keterbatasan anggaran dalam hal subsidi masyarakat kurang mampu	1. Tingkat inflasi daerah yang cenderung meningkat pada saat menjelang hari raya keagamaan	1. Ketersediaan bahan pokok masyarakat
		2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan pasar murah (BUMN dan BUMD)		



No	Program dan Kegiatan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
3.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan			
	1. Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	1. Keterbatasan anggaran kegiatan	1. Kurangnya kesadaran pedagang untuk menempati lokasi yang telah disediakan pemerintah	1. Tersedianya sarana perdagangan yang dibangun/revitalisasi serta dilengkapi fasilitas pendukung
		2. Terbatasnya tenaga aparatur untuk melakukan pembinaan kepada PKL		
		3. Kurangnya koordinasi lintas instansi dalam melakukan penataan PKL		



3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019, bahwa Visi Pembangunan Industri Tahun 2015-2019 adalah: “Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi tersebut Kementerian Perindustrian memiliki misi : (1) Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan; (2) Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi; (3) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; (4) Pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri Tahun 2015-2019 yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing.

Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dijelaskan pada bagian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian, antara lain Sasaran Strategis 1: meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional.

Meningkatnya peran industri di dalam perekonomian nasional diindikasikan dengan laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas dan meningkatnya Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB Nasional.

Di Kota Singkawang diharapkan pertumbuhan sektor industri khususnya industri kecil dan menengah dapat memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan dapat meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja.

Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri. Meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar.

Dengan mensinergiskan sasaran strategis pada Renstra Kementerian Perindustrian tersebut maka dalam Renstra Disdaginkopukm Kota Singkawang mencoba menuangkan program yang berkaitan dengan kegiatan promosi produk IKM di dalam dan luar provinsi. Diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat mengembangkan pasar produk IKM Kota Singkawang di pasar dalam negeri.



Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional. IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang mencapai lebih dari 90 persen dari unit usaha industri nasional.

Sebagai dukungan dalam pencapaian sasaran strategis tersebut Disdaginkopukm Kota Singkawang mencoba mengimplementasikan ke dalam kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE yang bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru. Diharapkan melalui kegiatan ini akan tumbuh IKM baru di Kota Singkawang.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi. Pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional.

Sebagai dukungan dalam pencapaian sasaran strategis tersebut Disdaginkopukm Kota Singkawang mencoba mengimplementasikan ke dalam berbagai macam kegiatan pelatihan yaitu Pendampingan Pelatihan Pengolahan Pangan, Fasilitasi Pendampingan Pelatihan Desain Kemasan, Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan, Pengembangan sistem inovasi teknologi industri, dan Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi. Diharapkan melalui kegiatan tersebut IKM di Kota Singkawang semakin menguasai teknologi industri dan memiliki daya saing yang tinggi.

Adapun tantangan yang dihadapi untuk mencapai sasaran yang diinginkan di sektor perindustrian adalah masih rendahnya daya saing daerah dan kurangnya penguasaan teknologi pada IKM. Sebagai faktor pendorong adalah ketersediaan bahan baku yang cukup di Kota Singkawang dan sebagian besar IKM di Kota Singkawang adalah IKM pengolahan pangan yang berpotensi untuk dibina dan dikembangkan.

Dalam Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2015-2019 berdasarkan visi dan misi presiden memiliki tujuan Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan.

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM untuk Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan dengan Tujuan yang akan diwujudkan yaitu : (1) Kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan Komoditas berbasis koperasi/ sentra di sektor-sektor unggulan; (2) Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM; (3) Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat.



Berkaitan dengan Sasaran Strategis dalam Kementerian Koperasi dan UKM yaitu Kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan Komoditas berbasis koperasi/ sentra di sektor-sektor unggulan, maka Disdaginkopukm Kota Singkawang memberikan dukungan dalam berbagai kegiatan seperti Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Penyusunan Database Usaha Mikro dan Kecil.

Sebagai dukungan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM”, Disdaginkopukm Kota Singkawang mencoba mengimplementasikan ke dalam kegiatan seperti Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD dan Fasilitasi Sarana Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi dan yang baik oleh masyarakat”, Disdaginkopukm Kota Singkawang melaksanakan kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi serta Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha melalui penyediaan Sistem Informasi Akuntansi bagi Koperasi.

Dengan memperhatikan pada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tersebut maka program pengembangan koperasi dan UKM di Kota Singkawang untuk lima tahun kedepan ditekankan pada pemberdayaan, peningkatan daya saing, fasilitasi sarana usaha dan peningkatan kelembagaan koperasi dan UKM.

Diprioritaskannya pelaksanaan program tersebut karena koperasi dan UKM di Kota Singkawang masih menghadapi tantangan seperti: kurangnya kemampuan SDM dari pengurus koperasi dan pengusaha UKM dalam mengelola usaha, terbatasnya sarana usaha koperasi dan UKM serta masih terbatasnya akses jaringan pemasaran produk yang dihasilkan koperasi dan UKM. Sebagai faktor pendorong adalah adanya potensi jumlah koperasi dan UMKM yang memerlukan pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana usaha.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 mengandung misi, tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Misi : Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas.

Tujuan : (1) Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri; (2) Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; (3) Peningkatan perlindungan konsumen; (4) Peningkatan Iklim Usaha dan Kepastian Berusaha.



Sasaran Strategis : (1) Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan; (2) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; (3) Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa..

Selanjutnya arah kebijakan perdagangan dalam negeri yang termuat dalam Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 adalah “meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan”.

Strategi yang perlu dilakukan dalam pembangunan perdagangan dalam negeri selama periode 2015-2019 adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga terutama melalui pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat serta pengembangan sistem distribusi bahan pokok; (2) Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia melalui promosi produk unggulan daerah antar wilayah di Indonesia.

Berkaitan dengan Sasaran Strategis dalam Renstra Kementerian Perdagangan: yaitu Meningkatnya Pertumbuhan PDB Sektor Perdagangan maka dalam program pembangunan sektor perdagangan di Kota Singkawang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB Kota Singkawang baik perdagangan besar maupun eceran. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan di Kota Singkawang maka melalui Disdaginkopukm melaksanakan program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan dengan implementasi kegiatan berupa pembangunan/revitalisasi pasar rakyat serta penyediaan fasilitas pendukungnya.

Sebagai dukungan pencapaian sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Perdagangan yaitu Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Disdaginkopukm Kota Singkawang mencoba mengimplementasikan ke dalam kegiatan pasar murah yang dilaksanakan pada saat menjelang hari Raya Keagamaan dan kegiatan operasi pasar pada saat pengendalian inflasi.

Sasaran strategis selanjutnya adalah Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen, Standardisasi, Pengendalian Mutu, Tertib Ukur dan Pengawasan Barang/Jasa. Untuk itu Disdaginkopukm Kota Singkawang memberikan dukungan dalam Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan melalui Kegiatan Operasional Metrologi Legal berupa tera/ tera ulang.

Adapun tantangan yang dihadapi untuk mencapai sasaran yang diinginkan di sektor perdagangan adalah penataan PKL yang belum maksimal dan terbatasnya fasilitas tempat usaha bagi PKL, belum



maksimalnya pemanfaatan pasar rakyat yang telah dibangun dan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap tertib ukur alat UTP. Sedangkan faktor pendorong untuk mencapai sasaran adalah telah dibangunnya infrastruktur perdagangan berupa pasar rakyat di berbagai wilayah kecamatan dan telah beroperasinya UPT Metrologi Legal sehingga diharapkan bisa meningkatkan pelayanan terhadap kemetrologian berupa tera/tera ulang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Untuk Renstra Perangkat Daerah tingkat provinsi yaitu Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 memuat berbagai sasaran strategis antara lain : tumbuh dan berkembangnya sektor IKM di Kalimantan Barat, meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan organisasi.

Dalam rangka mensinergiskan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi tersebut dengan Renstra Disdaginkopukm Kota Singkawang maka program-program yang tercantum di dalam Renstra Disdaginkopukm Kota Singkawang senantiasa mendukung target pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Adapun kegiatan yang direncanakan di Kota Singkawang melalui Disdaginkopukm berkaitan dengan pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan kemampuan SDM industri kecil menengah, penataan pasar, promosi perdagangan, pembinaan PKL dan peningkatan pelayanan metrologi legal berupa tera/tera ulang alat UTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Singkawang Tahun 2012-2032 disebutkan tentang penetapan kawasan strategis kota dan arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan. Kebijakan-kebijakan mengenai arah pembangunan jangka panjang yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah Kota Singkawang antara lain Wilayah Singkawang Tengah dan Singkawang Barat sebagai pusat pemerintahan, pusat permukiman, pusat kegiatan perdagangan grosir dan jasa komersial, serta pusat pengembangan industri sedang hingga besar.

Renstra Disdaginkopukm Kota Singkawang sebagai pedoman arahan program harus bersinergi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Singkawang yang menjadi pedoman arahan kewilayahan. Selanjutnya Renstra Disdaginkopukm Kota Singkawang memuat strategi dan arah



kebijakan pengembangan perdagangan, industri kecil menengah dan usaha kecil menengah di Kota Singkawang.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 memuat kebijakan bahwa pengembangan kawasan pusat kota yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah. Pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, perikanan dan kelautan. Penataan kawasan strategis secara optimal untuk menjadi kawasan produktif yang mampu memacu perkembangan dan menumbuhkan sinergi perkembangan dengan kawasan sekitarnya.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Singkawang berdasarkan KLHS Kota Singkawang khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Disdaginkopukm adalah mendorong pengembangan sektor industri ke arah pengembangan dan pemanfaatan sentra industri kecil dan aneka industri dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan.

Berikut ini Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya dalam tabel.



Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
		Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Wilayah Singkawang Tengah dan Singkawang Barat sebagai pusat kegiatan perdagangan grosir dan pusat pengembangan industri sedang hingga besar.	1. Kurangnya kekuatan anggaran untuk menyediakan dan mengembangkan sarana infrastruktur perdagangan beserta fasilitas pendukung khususnya Pasar Rakyat di tiap Kecamatan	1. Kondisi tata kota yang masih dalam proses perbaikan dan penyempurnaan, berakibat sulitnya pengaturan pedagang kaki lima (PKL)	1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pembinaan pada pedagang kaki lima (PKL)
				2. Tersedianya cukup lahan atau lokasi pengembangan Pasar Rakyat
		2. Belum optimalnya pemanfaatan pasar rakyat yang telah dibangun	2. Kurangnya kesadaran PKL untuk bisa direlokasi dan menempati pasar rakyat yang sudah dibangun	3. Koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pembinaan pada pedagang kaki lima (PKL)
				4. Sudah terbangunnya pasar rakyat di beberapa wilayah kecamatan
		3. Kurangnya kekuatan anggaran untuk fasilitasi pendampingan pelatihan dan penyediaan sarana prasarana pendukung bagi pengembangan usaha IKM	3. Kurangnya keterampilan, penguasaan teknologi dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh industri kecil menengah	5. Kegiatan pelatihan secara berkesinambungan dan peran serta lembaga keuangan perbankan dan non perbankan dalam mendukung permodalan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan mempertimbangkan berbagai telaahan yang telah disebutkan diatas maka Disdaginkopukm Kota Singkawang menentukan beberapa isu strategis yang akan digunakan dalam menyusun kebijakan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kreativitas, inovasi dan daya saing daerah.

Pertumbuhan industri kecil menengah di Kota Singkawang belum disertai dengan peningkatan kreativitas, inovasi dan daya saing, sehingga akan menghadapi kendala dalam memasuki pasar. Daya saing Kota Singkawang dapat dicapai dengan mengembangkan produk unggulan atau kompetensi inti yang dimiliki oleh Kota Singkawang. Dalam konteks pengembangan produk unggulan merupakan upaya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sektor-sektor berkembang di suatu wilayah tertentu. Keunggulan bersaing wilayah tercipta apabila wilayah tersebut memiliki produk unggulan yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Pengembangan produk unggulan dapat diperoleh melalui upaya penciptaan atau aksesibilitas terhadap faktor produksi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Langkah yang perlu dilaksanakan Pemerintah Kota antara lain dengan Sosialisasi Penerapan P-IRT bagi IKM pangan, fasilitasi bantuan mesin peralatan maupun pelatihan desain kemasan.

2. Kemampuan SDM pelaku usaha yang masih terbatas

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Singkawang masih menghadapi berbagai kendala dan masalah dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut disebabkan kurangnya kemampuan SDM, pengetahuan terhadap pemanfaatan teknologi yang memadai, jaringan akses pasar yang terbatas, kurangnya kemampuan dan informasi untuk akses permodalan serta sistem manajemen usaha yang belum profesional.

Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kota dapat melakukan upaya melalui berbagai program seperti fasilitasi pendampingan pelatihan mencakup peningkatan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan SDM pelaku usaha maupun fasilitasi sarana usaha.

3. Kurangnya jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat

Perekonomian merupakan salah satu indikator kekuatan suatu wilayah dan wirausahawan bisa menjadi ujung tombak dalam pertumbuhan perekonomian suatu wilayah tersebut karena semakin banyak bermunculan para wirausahawan, maka perkembangan suatu wilayah akan lebih pesat.



Sehubungan dengan itu pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan kepada masyarakat khususnya generasi muda di antaranya melalui pelatihan atau pendampingan.

Adapun ciri-ciri dari jiwa wirausaha antara lain: berpandangan kreatif dengan imajinasi konstruktif, memiliki kemampuan untuk menyerap dan menciptakan kesempatan, memiliki disiplin dan tanggung jawab untuk maju dan berkembang serta memiliki kemampuan manajemen dan strategi pasar. Melihat Kota Singkawang dimana keberadaan usaha kecil dan menengah semakin tumbuh dan berkembang maka perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan kompetensi dan jiwa kewirausahaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.

4. Belum berkembangnya industri kecil menengah berbasis sumber daya alam

Secara umum pengembangan industri membutuhkan sekurangnya empat pilar utama yakni bahan baku, teknologi, sumber daya manusia (SDM) dan lembaga-lembaga pembiayaan. Industri berbasis sumber daya alam adalah industri yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari alam, termasuk di antaranya hasil pertanian, perkebunan, pertambangan dan lain-lain.

Di Kota Singkawang terdapat berbagai sumber daya alam yang bisa dikembangkan oleh industri kecil dan menengah antara lain: bahan baku clay untuk industri keramik, kayu untuk industri furniture/mebel, tanaman kelapa untuk industri kerajinan dan buah-buahan untuk industri pengolahan makanan.

5. Terbatasnya sarana infrastruktur perdagangan khususnya Pasar Tradisional beserta fasilitas pendukungnya

Aktivitas perdagangan di Kota Singkawang masih terfokus di pusat Kota, sehingga pengaruh perkembangan sektor perdagangan dan ekonomi belum terasa di pinggiran Kota, sehingga perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Kota untuk pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah kecamatan khususnya penyediaan sarana infrastruktur perdagangan beserta fasilitas pendukungnya. Upaya tersebut antara lain berupa pembangunan Pasar Rakyat/Tradisional di Singkawang Selatan maupun pengembangan atau revitalisasi Pasar Tradisional yang telah ada di Kecamatan Singkawang Tengah, Barat, Utara dan Timur

Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.4
Penyusunan Isu Strategis

Isu Strategis sesuai RPJMD		Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	Solusi untuk Prioritas Renstra Perangkat Daerah
1		2	3
1	Masih terbatasnya Infrastruktur dasar	1 Masih rendahnya kreativitas, inovasi dan daya saing daerah	Peningkatan kualitas produk IKM Kota Singkawang melalui Sosialisasi Penerapan P-IRT bagi IKM pangan, fasilitasi bantuan mesin peralatan, pelatihan desain kemasan maupun promosi
2	Belum berkembangnya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi	2 Kemampuan SDM pelaku usaha yang masih terbatas	Fasilitasi pendampingan pelatihan mencakup peningkatan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan SDM pelaku usaha IKM/UMKM
		3 Masih kurangnya jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat	Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan kepada masyarakat maupun pelaku usaha mikro kecil melalui pelatihan kewirausahaan
		4 Belum berkembangnya industri kecil menengah berbasis sumber daya alam	Pengembangan industri kecil dan menengah di Kota Singkawang berbasiskan sumber daya alam daerah antara lain: bahan baku clay untuk industri keramik, kayu untuk industri furniture/mebel, tanaman kelapa untuk industri kerajinan dan buah-buahan untuk industri pengolahan makanan
		5 Terbatasnya sarana infrastruktur perdagangan khususnya Pasar Tradisional beserta fasilitas pendukungnya	Penyediaan sarana infrastruktur perdagangan dan fasilitas pendukungnya berupa pembangunan Pasar Rakyat khususnya di Kecamatan Singkawang Selatan maupun pengembangan/ revitalisasi Pasar Rakyat yang telah ada di Kecamatan Singkawang Tengah, Barat, Utara dan Timur



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang, maka Disdaginkopukm melalui tugas, fungsi dan kewenangannya perlu menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun jangka waktu perencanaan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Visi Pemerintah Kota Singkawang yaitu **“Singkawang HEBAT 2022”**. Sedangkan misi Pemerintah Kota Singkawang yang tercantum dalam RPJMD 2018-2022 khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Disdaginkopukm Kota Singkawang adalah misi kedua: **“Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri”**; dan misi ketujuh **“Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata”**;

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dirumuskan oleh Disdaginkopukm Kota Singkawang sebagai wujud implementasi dari berjalannya misi guna mewujudkan visi Pemerintah Kota Singkawang, adalah sebagai berikut :

1. Misi kedua : **“Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri”**, untuk mencapai target misi kedua dirumuskan Tujuan yaitu : Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM dan industri, dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri.
2. Misi ketujuh : **“Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata”**, untuk mencapai target misi ketujuh dirumuskan Tujuan yaitu : Meningkatnya daya saing sektor perdagangan, dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas perdagangan

Berikut ini adalah Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Disdaginkopukm Kota Singkawang dalam tabel :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM dan industri	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	Volume usaha koperasi	355.973.061.900	363.092.523.100	270.728.937.000	272.082.581.600	273.442.994.500
			Volume usaha UMKM	571.356.084.000	628.491.692.400	691.340.861.600	760.474.947.700	836.522.442.400
			Persentase koperasi sehat	55	60	65	67	70
			Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya	5,28	6,86	7,96	9,12	10,18
			Persentase Cakupan UMKM yang Aktif	98,59	98,72	98,80	98,86	98,93
			Persentase pertumbuhan UMKM	4	4	5	5	5
			Persentase peningkatan Usaha Mikro naik kelas menjadi Usaha Kecil	5	5	5	5	5



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase koperasi aktif	55	60	65	70	75
			Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi	-	-	-	45	45
			Persentase Peningkatan Koperasi Berprestasi	7	7	7	7	7
			Nilai PDRB sektor industri	913.426.710.000	959.098.045.500	1.007.052.947.775	1.057.405.595.164	1.110.275.874.922
			Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	4,63	5,79	6,94	8,10	9,26
			Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek	10,29	8,29	8,80	-	-
			Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah	4	4	4	4	4



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase peningkatan kemampuan teknologi industri	3,43	3,32	-	-	-
			Cakupan IKM yang memanfaatkan teknologi industri	-	-	6,40	-	-
			Persentase penataan struktur industri	0	0,33	0,32	-	-
			Persentase industri formal aktif	-	-	-	80,53	80,74
			Persentase industri kecil dan menengah yang difasilitasi	-	-	-	7,69	9,23
2	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Meningkatnya kualitas perdagangan	Volume usaha perdagangan	1.400.887.160.000	1.470.931.518.000	1.544.478.093.900	1.621.701.998.595	1.702.787.098.525
			Persentase pertumbuhan perdagangan formal	10	10	10	10	10



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase distribusi bahan pokok	85	87	90	92	95
			Persentase Cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah	70	70	80	80	80
			Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	13	13	13	13	13
			Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	80	85	90	91	92
			Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP	75	80	85	90	95
			Persentase peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan	-	-	-	10	10



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan arah kebijakan.

Strategi merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022, dirumuskan sebagaimana uraian pada tabel dibawah ini.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Singkawang HEBAT 2022			
MISI 2 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 . Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM dan industri	1. Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	1.1. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku UKM secara berkesinambungan	1.1. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
		1.2. Mengembangkan manajemen pengelolaan koperasi	1.2. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi
		1.3. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pengembangan UKM	1.3. Fasilitasi sarana prasarana pengembangan usaha UMKM
		1.4. Membina pelaku industri dalam mengembangkan keanekaragaman produk industri	1.4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku industri kecil dan menengah
		1.5. Membantu akses permodalan dan peralatan	1.5. Menyiapkan sarana prasarana untuk pengembangan usaha IKM
		1.6. Mengembangkan akses informasi dan pengembangan teknologi industri	1.6. Meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada proses industri
		1.7. Memfasilitasi akses informasi dan pemasaran produk industri	1.7. Memperluas pemasaran melalui pameran



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1.8. Pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan (IUI) Menengah	1.8. Pengawasan Pelaksanaan (IUI) bagi Industri Kecil dan Menengah
MISI 7 : Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1. Meningkatnya kualitas perdagangan	1.1. Meningkatkan infrastruktur perdagangan	1.1. Pembangunan/revitalisasi pasar tradisional
		1.2. Pembinaan terhadap pedagang	1.2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang
		1.3. Penataan manajemen dan sistem perdagangan	1.3. Pelatihan manajemen terhadap pelaku usaha 1.4. Pelaksanaan pasar murah 1.5. Pelaksanaan promosi perdagangan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

1. Rencana Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan MISI KEDUA Pemerintah Kota Singkawang yaitu : “Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri”

Tujuan 1 : Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM dan industri

Sasaran : Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri

Strategi 1 : Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku UKM secara berkesinambungan, dengan arah kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Strategi 2 : Mengembangkan manajemen pengelolaan koperasi, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi

Strategi 3 : Meningkatkan sarana prasarana pendukung pengembangan UKM, dengan arah kebijakan fasilitasi sarana prasarana pengembangan usaha UMKM

Rencana Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam beberapa arah kebijakan tersebut adalah :

1. Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Kegiatan :

- a. Penyusunan Profil Koperasi
- b. Fasilitasi Sarana Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil
- c. Penyusunan database Usaha Mikro dan Kecil
- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
- b. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD
- c. Peningkatan Standarisasi Mutu dan Sertifikasi produk
- d. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UKM
- e. Fasilitasi Permodalan Koperasi dan UMK

3. Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kegiatan :

- a. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah
- b. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah



- c. Penyediaan sarana informasi bagi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan :
 - a. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
 - b. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan
 - c. Penyuluhan dan Pendampingan Perkoperasian
 - d. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
5. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Kegiatan :
 - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ KotaSub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Kegiatan :
 - a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Ke anggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaSub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penghargaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
7. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ KotaSub Kegiatan :
 - a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
8. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Kegiatan :
 - a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan



Sub Kegiatan :

- a. Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- b. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

9. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan :

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Strategi 4 : Membina pelaku industri dalam mengembangkan keanekaragaman produk industri, dengan arah kebijakan meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku industri kecil dan menengah.

Strategi 5 : Membantu akses permodalan dan peralatan, dengan arah kebijakan menyiapkan sarana prasarana untuk pengembangan usaha IKM.

Strategi 6 : Mengembangkan akses informasi dan pengembangan teknologi industri, dengan arah kebijakan meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada proses industri.

Strategi 7 : Memfasilitasi akses informasi dan pemasaran produk industri, dengan arah kebijakan memperluas pemasaran melalui pameran.

Strategi 8 : Pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan (IUI) Menengah, dengan arah kebijakan Pengawasan Pelaksanaan (IUI) bagi Industri Kecil dan Menengah.

Rencana Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam beberapa arah kebijakan tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Kegiatan :

- a. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
- b. Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
- c. Pendampingan Pelatihan Pengolahan Pangan

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Kegiatan :

- a. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri



- b. Fasilitas Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta
- c. Singkawang Expo
- d. Pemberian Bantuan Mesin Dan Peralatan IKM
- e. Kegiatan Sosialisasi Penerapan P-IRT
- f. Promosi Produk IKM
- g. Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE (Creation Of Enterprises Formation Of Entrepreneurs)
- h. Fasilitas Pendampingan Pelatihan Desain Kemasan
- i. Penyediaan Sistem Informasi IKM
- j. Kegiatan sosialisasi dan penerapan Sertifikat Halal pada Produk Pangan
- k. Fasilitas Raperda pemberian subsidi bunga kepada IKM/UKM
- 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Kegiatan :
 - a. Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan
- 4. Program Penataan Struktur Industri
Kegiatan :
 - a. Kebijakan keterkaitan Industri hulu-hilir
 - b. Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri
- 5. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Kegiatan :
 - a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - d. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
- 6. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
Kegiatan :
 - a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah
Sub Kegiatan :
 - a. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri
7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
- Kegiatan :
- a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota

2. Rencana Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan MISI KETUJUH Pemerintah Kota Singkawang yaitu : “Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata”

Tujuan 1 : Meningkatnya daya saing sektor perdagangan

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas perdagangan

Strategi 1 : Meningkatkan infrastruktur perdagangan, dengan arah kebijakan pembangunan/revitalisasi pasar tradisional.

Strategi 2 : Pembinaan terhadap pedagang, dengan arah kebijakan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang

Strategi 3 : Penataan manajemen dan sistem perdagangan, dengan arah kebijakan pelatihan manajemen terhadap pelaku usaha, pelaksanaan pasar murah dan pelaksanaan promosi perdagangan

Rencana Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan dalam beberapa arah kebijakan tersebut adalah :

- 1. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Kegiatan :
 - a. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah
 - b. Monitoring produk pangan
- 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan :
 - a. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
 - b. Pasar Murah
 - c. Pelatihan Sumber Daya Pelaku Usaha
 - d. Penyusunan Profil Perdagangan
- 3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Kegiatan :
 - a. Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan



4. Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan
 - a. Penataan Pasar
 - b. Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL
 - c. Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Pasar
5. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Kegiatan :
 - a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi PerdaganganSub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - b. Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi PerdaganganKegiatan :
 - b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah KerjanyaSub Kegiatan :
 - a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
6. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Kegiatan :
 - a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/KotaSub Kegiatan :
 - a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
 - b. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
7. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaSub Kegiatan :
 - a. Pameran Dagang Nasional
8. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan PengawasanSub Kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang



3. Program Kesekretariatan

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi
- 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja outcomes dari berbagai program diatas dapat ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama yang digunakan dalam pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Disdaginkopukm. Rumusan Indikator Kinerja Utama tersebut bisa dilihat pada tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
1	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	Volume usaha koperasi
		Volume usaha UMKM
		Persentase koperasi sehat
		Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya
		Persentase Cakupan UMKM yang Aktif
		Persentase pertumbuhan UMKM
		Persentase peningkatan Usaha Mikro naik kelas menjadi Usaha Kecil
		Persentase Koperasi Aktif
		Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
		Persentase Peningkatan Koperasi Berprestasi
		Nilai PDRB sektor industri
		Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya
		Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek
		Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
		Persentase penataan struktur industri
		Persentase industri formal aktif
		Persentase industri kecil dan menengah yang difasilitasi
2	Meningkatnya kualitas perdagangan	Volume usaha perdagangan
		Persentase pertumbuhan perdagangan formal
		Persentase distribusi bahan pokok
		Persentase cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
		Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik
		Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTP
		Persentase peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang Tahun 2018-2022 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.2 terlampir.

Tabel 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2018-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.11.01.	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				10.020.535.250		8.779.920.000		4.983.375.560		15.562.450.775		20.600.913.524		59.947.195.109	
		2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				1.581.773.700		1.876.680.000		2.535.960.860		9.855.693.775		10.083.933.524		25.934.041.859	
		2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				1.581.773.700		1.876.680.000		2.535.960.860		9.855.693.775		10.083.933.524		25.934.041.859	
Meningkatkan kualitas administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Meningkatnya penyelesaian administrasi dan sarana prasarana perkantoran	2.11.2.11.01.001.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.107.407.100	100%	1.104.559.400	100%	1.059.341.360	-	-	-	-	300%	3.271.307.860	
		2.11.2.11.01.001.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan	100%	100%	4.625.000	100%	4.625.000	100%	600.000	-	-	-	-	300%	9.850.000	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.001.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	100%	176.800.000	100%	174.768.000	100%	129.960.000	-	-	-	-	300%	481.528.000	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.001.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	100%	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	6.000.000	-	-	-	-	300%	22.000.000	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.001.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan	100%	100%	104.350.000	100%	100.450.000	100%	116.675.000	-	-	-	-	300%	321.475.000	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.001.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan alat tulis kantor yang disediakan	100%	100%	93.634.000	100%	94.570.000	100%	48.134.500	-	-	-	-	300%	236.338.500	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.001.011.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	100%	93.933.000	100%	94.872.000	100%	96.705.000	-	-	-	-	300%	285.510.000	DPPK UKM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.11.2.11.01.001.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	100%	10.755.000	100%	12.091.000	100%	9.786.000	-	-	-	-	300%	32.632.000	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.001.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	100%	136.945.000	100%	130.840.000	100%	181.108.600	-	-	-	-	300%	448.893.600	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.001.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	100%	16.342.600	100%	17.000.000	100%	17.019.200	-	-	-	-	300%	50.361.800	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.001.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100%	100%	6.480.000	100%	6.480.000	100%	8.640.000	-	-	-	-	300%	21.600.000	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.001.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan makanan dan minuman yang disediakan	100%	100%	34.400.000	100%	34.400.000	100%	22.125.000	-	-	-	-	300%	90.925.000	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.001.018.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan	100%	100%	327.056.500	100%	332.377.400	100%	221.918.380	-	-	-	-	300%	881.352.280	Dalam Provinsi dan Luar Provinsi
		2.11.2.11.01.001.020.	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Cakupan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang disediakan	100%	100%	94.086.000	100%	94.086.000	100%	200.669.680	-	-	-	-	300%	388.841.680	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	144.593.000	100%	167.043.000	100%	767.151.000	-	-	-	-	300%	1.078.787.000	
		2.11.2.11.01.002.005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	7 unit	156.000.000	-	-	-	-	7 unit	156.000.000	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.002.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	10 unit	3 unit	16.350.000	3 unit	21.700.000	4 unit	30.000.000	-	-	-	-	10 unit	68.050.000	DPPK UKM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.11.2.11.01.002.010.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	4 jenis barang	-	-	2 jenis	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2 jenis barang	8.000.000	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.002.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	2 unit	-	-	1 unit	8.000.000	1 unit	494.240.000	-	-	-	-	-	2 unit	502.240.000	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.002.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	100%	100%	93.000.000	100%	93.000.000	100%	51.000.000	-	-	-	-	-	300%	237.000.000	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.002.028.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan AC, printer, komputer/PC dan laptop	100%	100%	35.243.000	100%	36.343.000	100%	35.911.000	-	-	-	-	-	300%	107.497.000	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.006.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan	100%	100%	8.935.100	100%	12.237.600	100%	9.426.300	-	-	-	-	-	300%	30.599.000	
		2.11.2.11.01.006.004.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	4.218.800	1 dokumen	3.218.800	1 dokumen	2.525.300	-	-	-	-	-	3 dokumen	9.962.900	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.006.005.	Penyusunan LAKIP SKPD	Tersusunnya dokumen laporan kinerja tahunan SKPD	1 dokumen	-	-	1 dokumen	3.218.800	1 dokumen	2.396.000	-	-	-	-	-	2 dokumen	5.614.800	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.006.006.	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya dokumen Renstra SKPD	1 dokumen	1 dokumen	4.716.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	4.716.300	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.006.007.	Penyusunan LPPD/LKPJ	Tersusunnya dokumen LPPD/LKPJ SKPD	1 dokumen	-	-	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.014.500	-	-	-	-	-	2 dokumen	4.014.500	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.006.008.	Penyusunan Profil SKPD	Tersusunnya dokumen Profil SKPD	1 dokumen	-	-	1 dokumen	3.800.000	1 dokumen	2.490.500	-	-	-	-	-	2 dokumen	6.290.500	DPPK UKM
		2.11.2.11.01.051.	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Persentase Penilaian Bobot Jabatan Dalam Penetapan Standar Gaji PNS		-	-	100%	3.200.000	100%	-	-	-	-	-	-	200%	3.200.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.11.2.11.01.051.012.	Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	Tersusunnya dokumen analisis jabatan		-	-	1 dokumen	3.200.000	1 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	3.200.000	DPPK UKM
		2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100%	7.410.348.975	100%	7.600.534.724	200%	15.010.883.699	
		2.17.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase cakupan penyelesaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								100%	8.439.500	100%	9.262.300	200%	17.701.800	
		2.17.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja OPD yang tersusun								1 dokumen	2.014.500	1 dokumen	2.014.500	2 dokumen	4.029.000	DPPK UKM
		2.17.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LPPD/LKPJ OPD yang tersusun								1 dokumen	2.014.500	1 dokumen	2.014.500	2 dokumen	4.029.000	DPPK UKM
				Jumlah dokumen Profil OPD yang tersusun								1 dokumen	2.014.500	1 dokumen	2.014.500	2 dokumen	4.029.000	DPPK UKM
		2.17.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja tahunan SKPD yang tersusun								1 dokumen	2.396.000	1 dokumen	3.218.800	2 dokumen	5.614.800	DPPK UKM
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase cakupan penyelesaian adminitrasi keuangan								100%	4.673.246.275	100%	4.907.475.824	200%	9.580.722.099	
		2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan gaji dan tunjangan ASN serta jasa pendukung administrasi perkantoran yang disediakan								100%	4.670.720.975	100%	4.904.257.024	200%	9.574.977.999	DPPK UKM
		2.17.01.2.02.09	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun								1 dokumen	2.525.300	1 dokumen	3.218.800	2 dokumen	5.744.100	DPPK UKM
		2.17.01.2.03	Administrasi Umum	Persentase cakupan penyelesaian adminitrasi umum								100%	2.685.313.200	100%	2.683.796.600	200%	5.369.109.800	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.17.01.2.03.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan jasa surat menyurat yang disediakan									100%	1.000.000	100%	2.000.000	200%	3.000.000	DPPK UKM
		2.17.01.2.03.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan									100%	174.400.000	100%	180.177.000	200%	354.577.000	DPPK UKM
		2.17.01.2.03.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Cakupan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan									100%	6.000.000	100%	10.000.000	200%	16.000.000	DPPK UKM
		2.17.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan									100%	259.795.000	100%	259.795.000	200%	519.590.000	DPPK UKM
		2.17.01.2.03.10	Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan alat tulis kantor yang disediakan									100%	52.720.600	100%	63.264.000	200%	115.984.600	DPPK UKM
		2.17.01.2.03.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan									100%	135.544.700	100%	158.750.000	200%	294.294.700	DPPK UKM
		2.17.01.2.03.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan									100%	9.786.000	100%	9.786.000	200%	19.572.000	DPPK UKM
		2.17.01.2.03.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan									100%	186.058.600	100%	195.250.000	200%	381.308.600	DPPK UKM
		2.17.01.2.03.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Cakupan peralatan rumah tangga yang disediakan									100%	22.271.200	100%	38.250.000	200%	60.521.200	DPPK UKM
		2.17.01.2.03.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan									100%	8.640.000	100%	8.640.000	200%	17.280.000	DPPK UKM
		2.17.01.2.03.17	Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan makanan dan minuman yang disediakan									100%	38.250.000	100%	41.624.000	200%	79.874.000	DPPK UKM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.17.01.2.03.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan								100%	446.800.000	100%	460.203.000	200%	907.003.000	DPPK UKM
		2.17.01.2.03.20	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional								1 unit kendaraan roda empat dan 4 unit kendaraan roda dua	364.735.600	4 unit kendaraan roda 2	122.711.600	9 unit	487.447.200	DPPK UKM
		2.17.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor								22 unit	148.990.000	18 unit	185.700.000	40 unit	334.690.000	DPPK UKM
		2.17.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur								3 jenis barang	163.300.000	3 jenis barang	175.400.000	6 jenis barang	338.700.000	DPPK UKM
		2.17.01.2.03.28	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor								2 unit	558.725.000	2 unit	640.000.000	2 unit	1.198.725.000	DPPK UKM
		2.17.01.2.03.30	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Cakupan Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara								100%	71.500.000	100%	93.000.000	200%	164.500.000	DPPK UKM
		2.17.01.2.03.34	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Cakupan Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara								100%	36.796.500	100%	39.246.000	200%	76.042.500	DPPK UKM
		2.17.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase cakupan kedisiplinan Sumber Daya Aparatur								100%	43.350.000	-	-	100%	43.350.000	
		2.17.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai dan baju putih pegawai								44 paket baju dinas, 59 paket baju putih	43.350.000	-	-	44 paket baju dinas, 59 paket baju putih	43.350.000	DPPK UKM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM dan industri	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri			Volume usaha koperasi	301.315.493.900	355.973.061.900		363.092.523.100		270.728.937.000		272.082.581.600		273.442.994.500		273.442.994.500		
				Persentase koperasi sehat	35%	55%		60%		65%		67%		70%		70%		
				Volume usaha UMKM	493.265.770.000	571.356.084.000		628.491.692.400		691.340.861.600		760.474.947.700		836.522.442.400		836.522.442.400		
				Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/pendapatannya	4,25%	5,28%		6,86%		7,96%		9,12%		10,18%		39,40%		
		2.11.2.11.01.015.	Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Cakupan UMKM yang Aktif	5177	5417	155.249.500	5657	200.770.000							5657	356.019.500	
				Persentase Cakupan UMKM yang Aktif						98,80%	51.136.600		-		-	98,80%	51.136.600	
		2.11.2.11.01.015.012.	Penyusunan Profil Koperasi	Tersedianya informasi data profil koperasi yang valid bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan	-	58 koperasi aktif	62.730.500	-	-	50 koperasi aktif	-	-	-	-	-	50 koperasi aktif	62.730.500	Kota Singkawang
		2.11.2.11.01.015.013.	Fasilitasi Sarana Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil	Tersedianya sarana usaha yang memadai bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil	55 UMK	22 UMK	92.519.000	15 UMK	150.000.000	10 UMK	-	-	-	-	-	47 UMK	242.519.000	Kota Singkawang
		2.11.2.11.01.015.014.	Penyusunan database Usaha Mikro dan Kecil	Tersedianya database Usaha Mikro dan Kecil yang valid bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan	-	-	-	UMK di 1 kecamatan	50.770.000	UMK di 1 kecamatan	51.136.600	-	-	-	-	UMK di 2 kecamatan	101.906.600	Singkawang Barat & Tengah
		2.11.2.11.01.015.015.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro	Meningkatnya sarana dan prasarana pemasaran bagi Usaha Mikro	-	-	-	-	-	1 kawasan	-	-	-	-	-	1 kawasan	-	Singkawang Barat & Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.11.2.11.01.016.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Usaha Mikro Kecil yang dibina	3%	1%		1%	115.000.000								2%	115.000.000	
				Persentase pertumbuhan UMKM						5%	417.358.000	-	-	-	-	5%	417.358.000		
		2.11.2.11.01.016.006	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Meningkatnya SDM Usaha Mikro Kecil	45 UMK	-	-	25 UMK	50.000.000	25 UMK	323.500.000	-	-	-	-	50 UMK	373.500.000	Kota Singkawang	
		2.11.2.11.01.016.007	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD	Meningkatnya SDM Pengurus dan Pengawas dan pengelola Koperasi	30 Koperasi Aktif	-	-	15 Koperasi Aktif	65.000.000	15 Koperasi Aktif	93.858.000	-	-	-	-	30 Koperasi Aktif	158.858.000	Kota Singkawang	
		2.11.2.11.01.016.012	Peningkatan Standarisasi Mutu dan Sertifikasi produk	KUKM yang difasilitasi Penerapan Standarisasi mutu, sertifikasi produk, serta merek dan kemasan	-	-	-	-	-	30 KUKM	-	-	-	-	-	30 KUKM	-	Kota Singkawang	
		2.11.2.11.01.016.013	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UKM	Pelatihan Vocational	-	-	-	-	-	30 orang	-	-	-	-	-	30 orang	-	Kota Singkawang	
		2.11.2.11.01.016.014	Fasilitasi Permodalan Koperasi dan UMK	Wirausaha Pemula Yang Difasilitasi untuk mengakses Modal Usaha Pemula (Start Up Capital)	-	-	-	-	-	30 UMKM	-	-	-	-	-	30 UMKM	-	Kota Singkawang	
		2.11.2.11.01.017.	Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase ketersediaan sistem pendukung Usaha UMKM	0,97%	0,19%	117.277.500	0,29%	173.140.000								0,48%	290.417.500	
				Persentase peningkatan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil							5%	39.470.200		-	-	5%	39.470.200		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.11.2.11.01.017.005.	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	Jumlah UMKM yang dipantau	-	150 KUMKM	30.345.500	100 KUMKM	33.380.000	100 KUMKM	39.470.200	-	-	-	-	350 KUMKM	103.195.700	Kota Singkawang & Luar Daerah
		2.11.2.11.01.017.009.	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti kegiatan pameran di Kota Singkawang dan luar daerah	28 KUMKM, 3 kegiatan	5 KUMKM, 1 kegiatan	64.997.750	5 KUMKM, 2 kegiatan	124.760.000	5 KUMKM, 1 kegiatan	-	-	-	-	-	15 KUMKM, 4 kegiatan	189.757.750	Kota Singkawang & Luar Daerah
		2.11.2.11.01.017.012.	Penyediaan sarana informasi bagi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil	Tersedianya sarana informasi tentang legalitas usaha dan perizinan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil	-	25 Koperasi dan 500 UMK	21.934.250	10 Koperasi dan 500 UMK	15.000.000	10 Koperasi dan 500 UMK	-	-	-	-	-	45 Koperasi dan 1.500 UMK	36.934.250	Kota Singkawang
		2.11.2.11.01.018.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	35%	55%	48.311.500	60%	100.730.000	65%	192.077.400	-	-	-	-	65%	341.118.900	
		2.11.2.11.01.018.005.	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah Koperasi aktif yang menjadi nominator koperasi berprestasi dan terpilihnya Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Singkawang	20 koperasi berprestasi	10 koperasi berprestasi	48.311.500	20 koperasi aktif	55.000.000	20 koperasi aktif	101.826.500	-	-	-	-	50 koperasi aktif	205.138.000	Kota Singkawang
		2.11.2.11.01.018.009.	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang mendapat pelatihan penyusunan Laporan Triwulanan	-	-	-	15 Koperasi	45.730.000	15 Koperasi	90.250.900	-	-	-	-	30 Koperasi	135.980.900	Kota Singkawang
		2.11.2.11.01.018.011.	Penyuluhan dan Pendampingan Perkoperasian	Pendampingan Kelompok Pra Koperasi Untuk Membentuk Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Singkawang
		2.11.2.11.01.018.012.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya kepatuhan koperasi terhadap peraturan perkoperasian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi Berprestasi	-	-		-		-		7%	259.060.000	7%	264.610.000	14%	523.670.000	
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Berprestasi Meningkat								5	259.060.000	5	264.610.000	25	523.670.000	
		2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	(Penghargaan Koperasi Berprestasi) Jumlah Koperasi aktif yang menjadi nominator koperasi berprestasi dan terpilihnya Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Singkawang								20 koperasi aktif	105.727.000	20 koperasi aktif	105.743.000	40 koperasi aktif	211.470.000	Kota Singkawang
		2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Bimtek Penyusunan Laporan Triwulan KSP/USP) Jumlah Laporan Triwulanan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang tersedia dan Meningkatnya persentase pelaksanaan RAT Koperasi								15 Koperasi	55.333.000	15 Koperasi	60.867.000	30 Koperasi	116.200.000	Kota Singkawang
				(Pengawasan Koperasi) Jumlah koperasi yang mematuhi peraturan perkoperasian meningkat								24 Koperasi	48.000.000	24 Koperasi	48.000.000	48 Koperasi	96.000.000	Kota Singkawang
				(Pembubaran Koperasi Tidak Aktif) Jumlah Koperasi Tidak Aktif yang diajukan untuk dibubarkan Kemenkop dan UKM RI								10 Koperasi	50.000.000	10 Koperasi	50.000.000	20 Koperasi	100.000.000	Kota Singkawang
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi								45%	176.001.800	45%	176.001.800	90%	352.003.600	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Ke anggotaaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dinilai								30 KSP/USP koperasi aktif	176.001.800	30 KSP/USP koperasi aktif	176.001.800	60 KSP/USP koperasi aktif	352.003.600	
		2.17.03.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi Aktif yang menjadi nominator Koperasi Sehat danTerpilihnya Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Singkawang								30 KSP/USP koperasi aktif	90.250.900	30 KSP/USP koperasi aktif	90.250.900	60 KSP/USP koperasi aktif	180.501.800	Kota Singkawang
		2.17.03.2.01.02	Penghargaan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi Sehat yang menjadi nominator Koperasi Sehat danTerpilihnya Koperasi Sehat Tingkat Kota Singkawang								25 KSP/USP Koperasi Sehat	85.750.900	25 KSP/USP Koperasi Sehat	85.750.900	50 KSP/USP Koperasi Sehat	171.501.800	Kota Singkawang
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif								70%	332.153.000	75%	338.493.000	75%	670.646.000	
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi aktif								66 Koperasi Aktif	332.153.000	67 Koperasi Aktif	338.493.000	67 Koperasi Aktif	670.646.000	
		2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi aktif yang memenuhi Syarat Formulir Pengajuan Setifikat NIK (Workshop Sertifikasi Nomor Induk Koperasi /NIK)								15 Koperasi Aktif	50.000.000	15 Koperasi Aktif	50.000.000	30 Koperasi Aktif	100.000.000	Kota Singkawang
				Jumlah SDM Pengurus/ pengelola dan Pengawas Koperasi yang mendapat pelatihan meningkat (Pelatihan Manajemen Koperasi)								15 Koperasi Aktif	71.790.000	15 Koperasi Aktif	78.130.000	30 Koperasi Aktif	149.920.000	Kota Singkawang
				Jumlah Koperasi berkembang yang mendapat Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan (Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi)								10 Koperasi	150.000.000	10 Koperasi	150.000.000	20 Koperasi	300.000.000	Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Jumlah Kelompok Pra Koperasi Untuk Membentuk Koperasi yang mendapat Pendampingan								30 Kelompok UMK dan Pra Koperasi	60.363.000	30 Kelompok UMK dan Pra Koperasi	60.363.000	60 Kelompok UMK dan Pra Koperasi	120.726.000	Kota Singkawang		
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan UMKM									5%	145.380.000	5%	154.418.000	10%	299.798.000		
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM meningkat									300 UMKM	145.380.000	300 UMKM	154.418.000	600 UMKM	299.798.000		
		2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah tersedianya database Usaha Mikro dan Kecil yang valid bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan									UMK di 1 Kecamatan	60.000.000	UMK di 2 kecamatan	65.000.000	UMK di 3 kecamatan	125.000.000	Kota Singkawang	
		2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM Potensial yang mendapat Sosialisasi Akses Pendanaan									25 KUMKM	45.000.000	25 KUMKM	45.000.000	50 KUMKM	90.000.000	Kota Singkawang	
		2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang dipantau										100 KUMKM	40.380.000	100 KUMKM	44.418.000	200 KUMKM	84.798.000	Kota Singkawang
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil										5%	1.532.750.000	5%	1.549.876.000	10%	3.082.626.000	
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang terfasilitasi										253	1.532.750.000	253	1.549.876.000	506	3.082.626.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil yang mendapat fasilitasi sarana usaha yang memadai (Fasilitasi Sarana Bagi KUMKM)								20 UMK	124.390.000	20 UMK	137.829.000	40 UMK	262.219.000	Kota Singkawang	
				Jumlah UMKM yang mengikuti kegiatan pameran di Kota Singkawang dan luar daerah (Pameran Promosi KUMKM)								5 KUMKM, 2 kegiatan	132.360.000	5 KUMKM, 2 kegiatan	136.047.000	10 KUMKM, 4 kegiatan	268.407.000	Dalam dan Luar Kota Singkawang	
				Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil yang mengikuti pelatihan di Kota Singkawang (Pelatihan Kewirausahaan)									210 UMK	160.000.000	210 UMK	160.000.000	420 UMK	320.000.000	Kota Singkawang
				Jumlah UMKM yang mendapat bantuan peralatan/ sarana produksi di Kota Singkawang									18 Kelompok/ UMK	1.116.000.000	18 Kelompok/ UMK	1.116.000.000	36 Kelompok/ UMK	2.232.000.000	Kota Singkawang
		3.	URUSAN PILIHAN				8.438.761.550		6.903.240.000		2.447.414.700		5.706.757.000		10.516.980.000		34.013.153.250		
		3.07.	INDUSTRI				986.538.000		2.097.580.000		944.536.900		2.830.000.000		3.193.000.000		10.051.654.900		
				Nilai PDRB sektor industri	869.503.900.000	913.426.710.000		959.098.045.500		1.007.052.947.775		1.057.405.595.164		1.110.275.874.922		1.110.275.874.922			
				Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	4,05%	4,63%		5,79%		6,94%		8,10%		9,26%		34,72%			
		3.07.2.11.01.015.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase industri kecil dan menengah yang dibina	10,29%	10,29%	116.981.500	8,29%	185.000.000			-	-	-	-	18,58%	301.981.500		
				Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek						8,80%		-	-	-	-	8,80%		-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3.07.2.11.01.015.005.	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah IKM yang menerapkan Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam mengatasi hambatan di lingkungan kerjanya	-	-	-	-	-	5 IKM	-	-	-	-	-	-	5 IKM	-	Kota Singkawang
		3.07.2.11.01.015.006.	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah IKM berbasis tekonologi yang menerapkan digital marketing dalam pemasaran produknya	20 IKM	20 IKM	22.993.000	20 IKM	35.000.000	20 IKM	-	-	-	-	-	-	60 IKM	57.993.000	Kota Singkawang
		3.07.2.11.01.015.007.	Pendampingan Pelatihan Pengolahan Pangan	Jumlah perajin pangan berbahan kedelai, kopi, aneka kue atau snack, aneka buah dan pengolahan hasil laut yang meningkat ketrampilannya	20 IKM	40 IKM	93.988.500	60 IKM	150.000.000	60 IKM	-	-	-	-	-	-	160 IKM	243.988.500	Kota Singkawang
		3.07.2.11.01.016.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase pengembangan industri kecil menengah yang dibina	9,26%	6,00%	823.428.500	21,56%	1.481.840.000								27,56%	2.305.268.500	
				Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah		4%		4%		4%	387.940.000						12%	387.940.000	
		3.07.2.11.01.016.002.	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Meningkatnya IKM yang terbina melalui pendataan	-	-	-	100 IKM	82.000.000	60 IKM	37.106.000	-	-	-	-	-	160 IKM	119.106.000	Kota Singkawang
		3.07.2.11.01.016.006.	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta	Meningkatnya IKM unggulan yang bermitra dengan Pasar Modern dan Semi Modern	-	-	-	20 IKM	25.000.000	40 IKM	159.139.000	-	-	-	-	-	60 IKM	184.139.000	Kota Singkawang
		3.07.2.11.01.016.007.	Singkawang Expo	Jumlah IKM/UKM yang mengikuti expo dan Jumlah pengunjung stand Singkawang Expo per hari	160 peserta, 5.500 org/hr	165 peserta, 5.500 org/hr	438.944.000	165 peserta, 5.500 org/hr	465.000.000	165 peserta, 5.500 org/hr	-	-	-	-	-	-	165 peserta, 5.500 org/hr	903.944.000	Kota Singkawang
		3.07.2.11.01.016.009.	Pemberian Bantuan Mesin Dan Peralatan IKM	Jumlah paket bantuan mesin dan peralatan serta rumah produksi bagi IKM Kerajinan dan Pengolahan Pangan	2 IKM/Kelompok	5 IKM/Kelompok	225.997.000	8 IKM/Kelompok	140.000.000	4 IKM/Kelompok	120.000.000	-	-	-	-	-	17 IKM/Kelompok	485.997.000	Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3.07.2.11.01.016.010.	Kegiatan Sosialisasi Penerapan P-IRT	Jumlah IKM yang memperoleh sertifikat penyuluhan PIRT meningkat	40 IKM	-	-	20 IKM	30.040.000	40 IKM	-	-	-	-	-	-	60 IKM	30.040.000	Kota Singkawang
		3.07.2.11.01.016.011.	Promosi Produk IKM	Jumlah kegiatan promosi yang diikuti	5 kegiatan	2 kegiatan	158.487.500	3 Kegiatan	390.000.000	1 Kegiatan	71.695.000	-	-	-	-	-	6 Kegiatan	620.182.500	Luar Kota Singkawang
		3.07.2.11.01.016.012.	Pelatihan Kewirausahaan Model CEFE (Creation Of Enterprises Formation Of Entrepreneurs)	Terciptanya wirausaha baru	48 Orang	-	-	24 Orang	117.800.000	24 Orang	-	-	-	-	-	-	48 Orang	117.800.000	Kota Singkawang
		3.07.2.11.01.016.013.	Fasilitasi Pendampingan Pelatihan Desain Kemasan	Meningkatnya IKM yang memahami pentingnya kemasan produk	20 Orang	-	-	20 Orang	37.000.000	20 Orang	-	-	-	-	-	-	40 Orang	37.000.000	Kota Singkawang
		3.07.2.11.01.016.014.	Penyediaan Sistem Informasi IKM	Meningkatnya IKM yang memanfaatkan teknologi Internet	-	-	-	20 IKM	195.000.000	20 IKM	-	-	-	-	-	-	40 IKM	195.000.000	Kota Singkawang
		3.07.2.11.01.016.015.	Kegiatan sosialisasi dan penerapan Sertifikat Halal pada Produk Pangan	Jumlah IKM yang memperoleh sertifikat Halal meningkat	-	-	-	-	-	10 IKM	-	-	-	-	-	-	10 IKM	-	Kota Singkawang
		3.07.2.11.01.016.016.	Fasilitasi Raperda pemberian subsidi bunga kepada IKM/UKM	Jumlah Raperda yang terbentuk	-	-	-	-	-	1 Raperda	-	-	-	-	-	-	1 Raperda	-	Kota Singkawang
		3.07.2.11.01.017.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase peningkatan kemampuan teknologi industri		3,43%	46.128.000	3,32%	50.740.000	-	-	-	-	-	-	-	6,75%	96.868.000	
				Cakupan IKM yang memanfaatkan teknologi industri						6,40%	-						6,40%	-	
		3.07.2.11.01.017.005.	Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan	Jumlah perajin berbahan kayu/furniture atau mebel, dan perajin berbahan tanaman kelapa yang meningkat keterampilannya.	20 IKM	1 Kegiatan, 20 IKM	46.128.000	1 Kegiatan, 20 IKM	50.740.000	1 Kegiatan, 20 IKM	-	-	-	-	-	-	3 Kegiatan, 60 IKM	96.868.000	Kota Singkawang
		3.07.2.11.01.018.	Program Penataan Struktur Industri	Persentase penataan struktur industri	-	-	-	0,33%	380.000.000	0,32%	556.596.900	-	-	-	-	-	0,65%	936.596.900	
		3.07.2.11.01.018.001.	Kebijakan keterkaitan Industri hulu-hilir	Jumlah Naskah RPIK yang tersusun	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	56.000.000	-	-	-	-	-	1 dokumen	56.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3.07.2.11.01.018.002.	Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri	Jumlah IKM yang mendapat bantuan rumah produksi	-	-	-	2 IKM	380.000.000	4 IKM	500.596.900	-	-	-	-	6 IKM	880.596.900	Kota Singkawang
		03:31:02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah								4%	1.050.000.000	4%	1.180.000.000	8%	2.230.000.000	
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Pembangunan Industri Kota yang dievaluasi								1 Dokumen	1.050.000.000	1 Dokumen	1.180.000.000	2 Dokumen	2.230.000.000	
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri								10 Kegiatan	300.000.000	10 Kegiatan	330.000.000	20 Kegiatan	630.000.000	Luar dan Dalam Kota Singkawang
		3.31.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								10 Kegiatan	250.000.000	10 Kegiatan	275.000.000	20 Kegiatan	525.000.000	Luar dan Dalam Kota Singkawang
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								10 Kegiatan	250.000.000	10 Kegiatan	275.000.000	20 Kegiatan	525.000.000	Luar dan Dalam Kota Singkawang
		3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi draf RPIK Kota Singkawang								1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	550.000.000	Luar dan Dalam Kota Singkawang
		03:31:03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri formal aktif								80,53%	680.000.000	80,74%	748.000.000	80,74%	1.428.000.000	
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah	Jumlah fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah yang dikeluarkan								12 Kegiatan	680.000.000	12 Kegiatan	748.000.000	24 Kegiatan	1.428.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI)								12 Kegiatan	240.000.000	12 Kegiatan	264.000.000	24 Kegiatan	504.000.000	Luar dan Dalam Kota Singkawang
		3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan								12 Kegiatan	240.000.000	12 Kegiatan	264.000.000	24 Kegiatan	504.000.000	Luar dan Dalam Kota Singkawang
		3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri								10 Kegiatan	200.000.000	10 Kegiatan	220.000.000	20 Kegiatan	420.000.000	Luar dan Dalam Kota Singkawang
		03:31:04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase industri kecil dan menengah yang difasilitasi								7,69%	1.100.000.000	9,23%	1.265.000.000	16,92%	2.365.000.000	
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah industri kecil dan menengah yang difasilitasi								50	1.100.000.000	60	1.265.000.000	110	2.365.000.000	
		3.31.04.2.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Data Informasi Industri yang dibutuhkan oleh masyarakat								5 Kegiatan	1.100.000.000	5 Kegiatan	1.265.000.000	10 Kegiatan	2.365.000.000	Luar dan Dalam Kota Singkawang
		3.06.	PERDAGANGAN				7.452.223.550		4.805.660.000		1.502.877.800		2.876.757.000		7.323.980.000		23.961.498.350	
Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Meningkatnya kualitas perdagangan			Volume usaha perdagangan	1.335.679.300.000	1.400.887.160.000		1.470.931.518.000		1.544.478.093.900		1.621.701.998.595		1.702.787.098.525		1.702.787.098.525		
				Persentase pertumbuhan perdagangan formal	10%	10%		10%		10%		10%		10%		50%		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi		
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3.06.2.11.01.015.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan pelayanan UPT Metrologi Legal (unit alat UTTP)	1.245 unit	1.500 unit	145.524.000	1.650 unit	152.800.000								1.650 unit			
				Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP						85%	115.612.900			-		-	85%	413.936.900		
		3.06.2.11.01.015.004.	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	1.245 unit	1.500 unit	145.524.000	1.650 unit	152.800.000	1.800 unit	82.915.300	-		-	-	-	4.950 unit	381.239.300	Kota Singkawang	
		3.06.2.11.01.015.007.	Monitoring produk pangan	Jumlah kegiatan monitoring yang terlaksana	-	-		-		-	24 kali	32.697.600	-		-	-	-	24 kali	32.697.600	Kota Singkawang
		3.06.2.11.01.018.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah	12.000 KK	12.000 KK	639.926.600	12.000 KK	905.920.000								12.000 KK	1.545.846.600		
				Jumlah penyelenggaraan promosi	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan									2 kegiatan			
				Cakupan pembinaan efisiensi perdagangan bagi pelaku usaha	150 pelaku usaha	35 pelaku usaha		150 pelaku usaha									185 pelaku usaha			
				Persentase distribusi bahan pokok						90%							90%			
				Persentase Cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah						80%	415.322.600		-		-		80%	415.322.600		
		3.06.2.11.01.018.003.	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	Jumlah kegiatan pameran produk dalam negeri yang diikuti agar produk lokal dapat dikenal secara luas di dalam negeri	2 keg. Pameran	1 keg. Pameran	115.504.100	1 keg. Pameran	130.000.000	1 keg. Pameran		-	-		-	-	-	3 keg pameran	245.504.100	Luar Daerah Kota Singkawang
3.06.2.11.01.018.009.	Pasar Murah	Jumlah momen pasar murah dan jumlah KK masyarakat kurang mampu yang terbantu	2 momen, 12.000 KK	2 momen, 12.000 KK	483.464.500	3 momen, 12.000 KK	500.000.000	3 momen, 12.000 KK	415.322.600	-		-	-	-	-	3 momen, 12.000 KK	1.398.787.100	Kota Singkawang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3.06.2.11.01.018.010.	Pelatihan Sumber Daya Pelaku Usaha	Jumlah sumber daya pelaku usaha yang mengikuti pelatihan	-	35 orang	40.958.000	150 orang	85.920.000	150 orang	-	-	-	-	-	335 orang	126.878.000	Kota Singkawang
		3.06.2.11.01.018.011.	Penyusunan Profil Perdagangan	Tersedianya database Sektor Perdagangan	-	-	-	1 dokumen	190.000.000	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	190.000.000	Kota Singkawang
		3.06.2.11.01.019.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	13 kelompok/ organisasi	13 kelompok/ organisasi	26.242.150	13 kelompok/ organisasi	70.000.000	13 kelompok/ organisasi	51.096.200	-	-	-	-	39 kelompok/ organisasi	147.338.350	
				Persentase peningkatan pedagang informal menjadi formal					10%						10%			
		3.06.2.11.01.019.001.	Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL yang mendapat sosialisasi dan pembinaan	-	200 PKL	26.242.150	300 PKL	70.000.000	200 PKL	51.096.200	-	-	-	-	700 PKL	147.338.350	Kota Singkawang
		3.06.2.11.01.021.	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	Jumlah pasar tradisional yang ditata/dibangun	3 unit pasar	3 unit pasar, 17 fasilitas pendukung	6.640.530.800	2 unit pasar, 9 fasilitas pendukung	3.676.940.000							5	10.317.470.800	
				Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik						90%	920.846.100		-	-	90%	920.846.100		
		3.06.2.11.01.021.001.	Penataan Pasar	Jumlah Pasar Rakyat yang terbangun/ direvitalisasi	3 unit pasar	2 unit pasar	3.000.000.000	-	-	1 unit	100.000.000	-	-	-	-	3 unit pasar	3.100.000.000	Singkawang Barat, Tengah dan Selatan
		3.06.2.11.01.021.002.	Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL	Jumlah fasilitas pendukung tempat berusaha yang terbangun	22 fasilitas	17 fasilitas	3.640.530.800	16 fasilitas	2.800.000.000	8 fasilitas	820.846.100	-	-	-	-	41 fasilitas	7.261.376.900	Singkawang Utara, Barat dan Timur
				Tersedianya gerobak PKL Pasar Hongkong	-	-	-	-	-	30 unit	-	-	-	-	-	30 unit	-	Pasar Hongkong
Tersedianya meja dan kursi PKL Pasar Hongkong	-			-	-	-	-	90 set	-	-	-	-	-	90 set	-	Pasar Hongkong		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3.06.2.11.01.021.003.	Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Pasar	Jumlah pengadaan tanah rencana lokasi sarana umum pasar yang tersedia	2 lokasi	-	-	1 lokasi	876.940.000	-	-	-	-	-	-	-	1 lokasi	876.940.000	Singkawang Selatan
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik								91%	1.787.330.000	92%	6.157.100.000	92%	7.944.430.000		
				Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal								13 kelompok/ organisasi		13 kelompok/ organisasi		26 kelompok/ organisasi			
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar tradisional dalam kondisi baik								5	1.600.850.000	6	5.938.360.000	6	7.539.210.000		
				Persentase pedagang yang bersedia menempati pasar yang telah dibangun								80		80		80			
		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitas pendukung tempat berusaha yang terbangun								8 fasilitas	1.450.850.000	8 fasilitas	5.788.360.000	16 fasilitas	7.239.210.000	Pasar Naram Singkawang Utara dan Pasar Bagak Sahwa Singkawang Timur	
		3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang yang dibina dan ditempatkan di pasar yang telah dibangun sarananya								350 pedagang	150.000.000	350 pedagang	150.000.000	700 pedagang	300.000.000	Pasar Semi Modern Alianyang, Pasar Naram Singkawang Utara dan Pasar Bagak Sahwa Singkawang Timur	
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah kelompok pedagang yang dibina								13	186.480.000	13	218.740.000	65	405.220.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah PKL yang mendapat sosialisasi dan pembinaan								300 PKL	84.700.000	300 PKL	93.170.000	600 PKL	177.870.000	Singkawang Utara
		3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sumber daya pelaku usaha yang mengikuti pelatihan								150 orang	101.780.000	150 orang	125.570.000	300 orang	227.350.000	Kota Singkawang
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase distribusi bahan pokok								92%	640.000.000	95%	640.000.000	95%	1.280.000.000	
				Persentase Cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah								80%		80%	80%			
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring dalam rangka pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting								24 kali	640.000.000	24 kali	640.000.000	48 kali	1.280.000.000	
				Jumlah momen pasar murah yang dilaksanakan								3 momen		3 momen	6 momen			
		3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan monitoring yang terlaksana								24 kali	40.000.000	24 kali	40.000.000	48 kali	80.000.000	Kota Singkawang
		3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah momen pasar murah dan jumlah masyarakat kurang mampu yang terbantu melalui pasar murah								3 momen, 13.500 KK	600.000.000	3 momen, 13.500 KK	600.000.000	6 momen, 27.000 KK	1.200.000.000	Lima Kecamatan Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan omset pelaku usaha produk unggulan								10	350.000.000	10	350.000.000	20	700.000.000	
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi dagang									3	350.000.000	3	350.000.000	6	700.000.000
		3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah kegiatan pameran produk dalam negeri yang diikuti agar produk lokal dapat dikenal secara luas								3 keg. Pameran	350.000.000	3 keg pameran	350.000.000	6 keg pameran	700.000.000	Luar Daerah Kota Singkawang
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP								90%	99.427.000	95%	176.880.000	95%	276.307.000	
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang								2.000 unit	99.427.000	2.150 unit	176.880.000	4.150 unit	276.307.000	
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang dalam kegiatan operasional metrologi legal								2.000 unit	99.427.000	2.150 unit	176.880.000	4.150 unit	276.307.000	Kota Singkawang
JUMLAH							10.020.535.250		8.779.920.000		4.983.375.560		15.562.450.775		20.600.913.524		59.947.195.109	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung program pembangunan daerah diperlukan program di Perangkat Daerah yang sejalan dan konsisten dengan tujuan dan sasaran RPJMD. Sehingga program kegiatan yang termuat dalam Renstra Disdaginkopukm Tahun 2018-2022 harus memiliki indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022.

Sejalan dengan misi Pemerintah Kota Singkawang khususnya pada : misi kedua **“Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri”**, dengan tujuan Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM dan industri, sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri. Maka Disdaginkopukm Kota Singkawang berupaya merumuskan indikator kinerja kedalam Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut pada Urusan Koperasi dan UKM dan Urusan Perindustrian.

- 1) Urusan Koperasi dan UKM, dengan indikator kinerja :
 - a. Volume usaha koperasi (Rp)
 - b. Volume usaha UMKM (Rp)
 - c. Persentase koperasi sehat (%)
 - d. Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/pendapatannya (%)
- 2) Urusan Perindustrian, dengan indikator kinerja :
 - a. Nilai PDRB sektor industri (Rp)
 - b. Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya (%)

Untuk misi ketujuh Pemerintah Kota Singkawang : **“Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata”**, dengan tujuan Meningkatnya daya saing sektor perdagangan, sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatnya kualitas perdagangan. Maka Disdaginkopukm Kota Singkawang merumuskan indikator kinerja kedalam Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut pada Urusan Perdagangan.

- 1) Urusan Perdagangan, dengan indikator kinerja :
 - a. Volume usaha perdagangan (Rp)
 - b. Persentase pertumbuhan perdagangan formal (%)



Indikator kinerja pelayanan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Singkawang selanjutnya ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini.



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2022
		Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Volume usaha koperasi (Rp)	301.315.493.900	355.973.061.900	363.092.523.100	270.728.937.000	272.082.581.600	273.442.994.500	273.442.994.500
2	Volume usaha UMKM (Rp)	493.265.770.000	571.356.084.000	628.491.692.400	691.340.861.600	760.474.947.700	836.522.442.400	836.522.442.400
3	Persentase koperasi sehat (%)	35,37	55	60	65	67	70	70
4	Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya (%)	4,25	5,28	6,86	7,96	9,12	10,18	39,41
5	Nilai PDRB sektor industri (Rp)	869.873.900.000	913.426.710.000	959.098.045.500	1.007.052.947.775	1.057.405.595.164	1.110.275.874.922	1.110.275.874.922
6	Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya (%)	4,05	4,63	5,79	6,94	8,10	9,26	34,72
7	Volume Usaha perdagangan (Rp)	1.400.887.160.000	1.400.887.160.000	1.470.931.518.000	1.544.478.093.900	1.621.701.998.595	1.702.787.098.525	1.702.787.098.525
8	Persentase pertumbuhan perdagangan formal (%)	10	10	10	10	10	10	50



BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk strategi, arah kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Untuk itu, terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 telah ditetapkan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 ;
2. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022, diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang yang ada di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang ;
3. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang ;



4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan APBD Kota Singkawang, keberadaan Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.

Singkawang, 2020

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang,

Drs. H. MUSLIMIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002